

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO**
(STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO)

Oleh

CINDRI MANGELA
E1119131

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO**
(STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO)

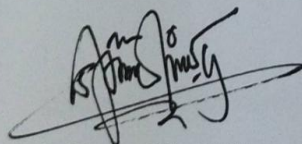
Oleh

CINDRI MANGELA
E1119131

SKRIPSI

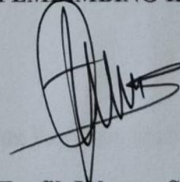
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dan Telah di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 16 Juni 2022

PEMBIMBING I



Sulfianty, SE., M.Si
NIDN : 09 030984 03

PEMBIMBING II



Taufik Udango, SE., M.Ak
NIDN : 09 280888 05

HALAMAN PERSETUJUAN

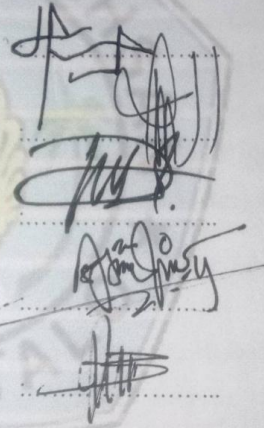
ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO)

Oleh

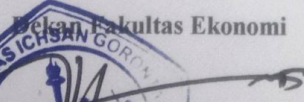
CINDRI MANGELA
E1119131

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

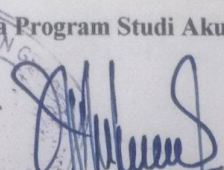
1. Syamsuddin, SE., MM., Ak
(Ketua Penguji)
2. Purnama Sari, SE., M.Si
(Anggota Penguji)
3. Agus Baku, SE., M.Si
(Anggota Penguji)
4. Sulfianty, SE., M.Si
(Pembimbing Utama)
5. Taufik Udango, SE., M.Ak
(Pembimbing Pendamping)



Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 09 287169 01


Ketua Program Studi Akuntansi

Melinda Ibrahim, SE., M.SA
NIDN : 09 200586 01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 18 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



Cindri Mangela

E1119131

ABSTRACT

CINDRI MANGELA. E1119131. ANALYSIS OF BUDGETS, REVENUE, AND EXPENDITURE IN POHUWATO REGIONAL GOVERNMENTS (A CASE STUDY AT THE REGIONAL FINANCE AGENCY)

This study aims at finding whether the use of the regional budget for revenues and expenditures in the local government of Pohnuato Regency had been carried out economically, efficiently, and effectively. The method used in this study is by analyzing the budget realization report to assess whether the use of the revenue and expenditure of the budget has been carried out economically, effectively, and efficiently. The results of this study indicate that: 1) The use of the revenue of the budget, in terms of revenue performance, is considered poor. The contribution of local revenue does not show the ability of local governments to implement decentralization. The level of dependence of the Pohnuato Regency Government on central government transfers is still very high. The ability of local governments to mobilize revenue from local revenue is less effective. 2) The use of the expenditure of the budget shows that the government's ability to make savings is efficient.

Keywords: budget, revenue, expenditure

ABSTRAK

CINDRI MANGELA. E1119131. ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran pendapatan serta pembelanjaan daerah di pemerintah daerah kabupaten pohuwato sudah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, serta efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai apakah penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sudah dilaksanakan secara ekonomis, efektifitas, dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Penggunaan Anggaran Pendapatan, dilihat dari sisi kinerja pendapatan dinilai kurang baik, kontribusi pendapatan asli daerah tidak mampu menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap transfer pemerintah pusat masihs angat tinggi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang efektif. 2. Penggunaan Anggaran Belanja menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan sudah efisien.

Kata kunci: anggaran, pendapatan, belanja

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin atas limpahan rahmat dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato”**. Skripsi ini disusun sebagai salah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa semua ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, bantuan, dan dukungan serta do’a dari kedua orang tua saya dan berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang setinggi tingginya kepada Ibu Sulfianty, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Taufik Udango, SE, M.Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIPT-IG).
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Ibu Melinda Ibrahim, SE., M.SA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan yang telah mendidik dan mengarahkan penulis.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya dalam penulisan Skripsi ini.

Gorontalo, 16 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Maksud Penelitian	4
1.3.2 Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	6
2.1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah	6
2.2. Konsep Anggaran	7
2.2.1. Pengertian Anggaran	7
2.2.2. Jenis-Jenis Anggaran	9
2.2.3. Fungsi Anggaran	10
2.2.4. Tujuan Anggaran	16

2.3. Belanja Daerah	17
2.4. Laporan Realisasi Anggaran	20
2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	20
2.4.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	22
2.4.3 Komponen Laporan Realisasi Anggaran	22
2.5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	24
2.5.1 Pengertian Anggaran Pendaapatan Dan Belanja Daerah ...	24
2.5.2 Pengertian Anggaran Pendaapatan Dan Belanja Daerah ..	27
2.5.3 Unsur-Unsur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	28
2.6. Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah	28
2.7. Penelitian Terdahulu	35
2.8. Kerangka Pemikiran	38
BAB III OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN	40
3.1 Obyek Penelitian	40
3.2 Jenis dan Sumber Data	40
3.2.1. Jenis Data	40
3.2.2. Sumber Data	40
3.3 Teknik Pengumpulan Data	41
3.4 Metode Analisis	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.2 Analisis Hasil Penelitian	46
4.2.1 Analisis Varians Pendapatan	46
4.2.2 Derajat Desentralisasi	48
4.2.3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	49
4.2.4 Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah ..	50
4.2.5 Analisis Varians Belanja	53
4.2.6 Rasio Efisiensi Belanja.....	55
4.3 Pembahasan	56
4.3.1 Analisis Varians Pendapatan	56

4.3.2 Derajat Desentralisasi	56
4.3.3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	57
4.3.4 Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah ..	57
4.3.5 Analisis Varians Belanja	58
4.3.6 Rasio Efisiensi Belanja	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai Efektif Pendapatan Asli Daerah	33
Tabel 2.2 Nilai Efisien Pendapatan Asli Daerah	34
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Nilai Efektiv Pendapatan Asli Daerah	42
Tabel 3.2 Nilai Efisien Pendapatan Asli Daerah	43
Tabel 4.1 Analisis varians pendapatan	46
Tabel 4.2 Selisih Anggaran Pendapatan Asli Daerah	47
Tabel 4.3 Derajat Desentralisasi	49
Tabel 4.4 Rasio ketergantungan daerah	50
Tabel 4.5 Rasio efektivitas pendapatan asli daerah	51
Tabel 4.6 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	52
Tabel 4.7 Realisasi Belanja Dan Anggaran Belanja	53
Tabel 4.8 Selisih Anggaran	54
Tabel 4.9 Rasio efesiensi belanja	55

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran	39
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	65
Lampiran 2 <i>Abstrack</i>	67
Lampiran 3 Abstrak	68
Lampiran 4 Struktur Organisasi BKD Kabupaten Pohuwato	69
Lampiran 5 Laporan Keuangan	70
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian	89
Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian	90
Lampiran 8 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	91
Lampiran 9 Hasil Turnitin	92
Lampiran 10 <i>Curriculum Vitae</i>	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Mengingat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sangat menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, maka kajian APBD diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang guna mendorong kinerja pemerintah. .

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan, salah satunya mengukur kinerja belanja daerah, tidak hanya untuk menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi juga untuk menunjukkan kemampuan dalam menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan secara efisien, efektif dan secara ekonomi.

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintah sebagai pelaporan pemerintah. Saat ini, banyak perhatian diberikan pada akuntansi oleh badan pemerintah, termasuk sektor publik, dan akuntansi oleh organisasi non-pemerintah.

Dengan semakin meningkatnya akuntansi sektor publik terkhusus di Indonesia dengan sangat pesat yang disebabkan dengan munculnya era baru didalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak kepada nasib sebuah daerah, hal ini disebabkan sebuah daerah bisa dijadikan daerah yang berkuasa serta kuat dan bisa

meningkatkan daerahnya ataupun menjadi tidak berdaya hal ini tergantung dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Didalam mengelola daerah secara ekonomis, efisien, serta efektif dan lain sebagainya maka bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kemudian bisa mengurangi angka pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Didalam mengelola daerah bukan hanya SDMnya saja yang diperlukan tetapi sumber daya ekonomi juga sangat diperlukan yang akan dicantumkan kedalam sebuah anggaran pemerintahan daerah yang melalui proses penyusunan anggaran dimana suatu rencana yang disusun secara sistematis yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter (nilai uang) dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Keuangan daerah adalah sebuah dokumen publik yang wajib diketahui oleh para rakyat, terdapat 4 laporan keuangan yang harus disampaikan yaitu :

- Laporan realisasi anggaran
- Neraca
- Laporan arus kas
- Catatan atas laporan keuangan

Sedangkan untuk melihat efisiensi serta efektivitas yang berasal dari pemerintahan daerah, maka bisa dilihat kinerja tersebut melalui

laporan realisasi anggaran. Didalam laporan ini bisa menjelaskan mengenai bandingan antara anggaran dengan realisasi didalam sebuah waktu pelaporan, tujuan dari laporan ini yaitu memberikan informasi mengenai realisasi serta anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Dengan kegiatan penyandingan antara anggaran serta realisasi bisa mengarahkan kepada tingkatan tercapainya target yang sudah di sepakati antara eksekutif dan legislatif yang sudah sesuai dengan peraturan yang diatur diundang-undang. Laporan realisasi anggaran terdiri dari :

- Income (pendapatan)
- transfer
- Pembelanjaan
- Defisit
- Penerimaan pembiayaan
- Pengeluaran pembiayaan
- Pembiayaan bersih
- Sisa lebih atau kurangnya pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Salah satu jenis laporan keuangan daerah yang lebih awal dihasilkan sebelum selanjutnya di isyaratkan didalam membuat laporan nerca serta laporan arus kas disebut dengan realisasi anggaran. Anggaran sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu pemerintahan, salah satu peran pentingnya yaitu sebagai alat stabilitas, distribusi, pengalokasian sumber daya publik, perencanaan, pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Dengan memperhatikan kondisi pemerintahan daerah, sehingga penulis tertarik untuk mengemukakan problem didalam proses analisis realisasi anggaran pendapatan serta belanja pemerintah daerah. Seluruh masalah ini yang menjadi sebuah latar belakang penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengambil judul **“Analisis Anggaran Pendapatan Dan Pembelanjaan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato”**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan dilatar belakang, maka yang menjadi problem didalam penelitian ini yaitu “ Apakah penggunaan anggaran pendapatan serta pembelanjaan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sudah dilaksanakan secara ekonomis, efesien, serta efektif ?”

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian.

Maksud penelitian ini dilakukan pada kantor badan keuanga daerah adalah untuk mendapatkan data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, terutama data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dengan meminta data Laporan Realisasi Anggaran.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan didalam penelitian ini yaitu “ Untuk mengetahui Apakah penggunaan anggaran pendapatan serta pembelanjaan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sudah dilaksanakan secara ekonomis, efesien, serta efektif.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten pohuwato agar dalam hal penggunaan anggaran dapat dipergunakan secara ekonomis, efesiensi dan efektif

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan Ilmu Akuntansi Pemerintahan berkaitan dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3. Bagi peneliti

Sebagai bahan perbandingan antara teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktek di lapangan dan akan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, yang berkeinginan melakukan penelitian yang sama mengenai penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2002:122), mengemukakan bahwa Akuntansi Pemerintah (termasuk didalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya) adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Selanjutnya Abdul halim (2008:36), Akuntansi keuangan daerah, yaitu suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemda (kabupaten, kota, atau provinsi).

Menurut Indra Bastian (2006:15), berpendapat bahwa sebuah mekanisme tehnik serta analisa akuntansi yang sudah ditentukan didalam mengelola dana rakyat pada unsur-unsur tertinggi dinegara serta departemen lain yang berada dibawah, pemerintahan daerah,BUMN, BUMD, LSM serta yayasan sosial ataupun didalam suatu prosek kerja sama antara sektor publik swasta disebut dengan akuntansi sektor publik.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6), mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian

keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

Menurut Deddi Nordiawan (2010:201) sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2.2. Konsep Anggaran

2.2.1. Pengertian Anggaran

Abdul Halim (2002:40), mengemukakan bahwa Anggaran Pemerintah Daerah adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja. Anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, dan estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Anggaran juga menggambarkan mengenai rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah daerah berdasarkan mandat yang diberikan oleh para stakeholder pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2005 : 62), bahwa seluruh anggaran publik itu berisi rencana aktivitas yang akan dilaksanakan didalam

bentuk rencana perolehan pendapatan serta pembelanjaan didalam satuan moneter. Dengan kata lain bahwa anggaran publik adalah sebuah dokumen yang menjelaskan mengenai keadaan keuangan dari sebuah organisasi yang berupa informasi tentang penghasilan, pembelanjaan serta kegiatan.

Nurlan Darise (2008 : 133), berpendapat bahwa dokemen hasil dari sebuah kesepakatan antara bagian eksekutif dan legislatif mengenai pembelanjaan yang sudah ditentukan didalam melakukan seluruh aktivitas pemerintahan serta pendapatan yang diharap guna menutupi kebutuhan pembelanjaan tersebut ataupun biaya yang dibutuhkan jika diperkirakan bisa menjadi defisit atau surplus disebut dengan anggaran pemerintahan. Dengan begitu sebuah anggaran melakukan sebuah koordinasi kegiatan pembelanjaan dipemrintahan serta memberikan landasan sebagai upaya didalam memperoleh suatu pendapatan serta pembiayaan oleh pemerintah didalam sebuah periode tertentu yang pada umumnya meliputi periode tahunan, namun tidak dipungkiri jika akan disiapkan sebuah anggaran untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun.

Indra Bastian (2006:163), mengemukakan bahwa anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Mohamad Mahsun (2006:81), mengemukakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan publik.

Menurut Wuryan Andayani (2007 : 63), anggaran adalah sebuah pedoman dalam bertindak yang akan dilakukan oleh pihak pemerintahan yang berupa perencanaan pendapatan, pembelanjaan, transfer, serta pembiayaan yang di ukur didalam satuan rupiah yang kemudian diatur berdasarkan pengklasifikasiannya masing-masing secara sistematis untuk 1 periode. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa dokumen formal hasil dari sebuah kesepakatan bersama antara bidang eksekutif serta legislatif mengenai pembelanjaan yang dibutuhkan disebut dengan anggaran pemerintahan. Anggaran mengelompokkan kegiatan pembelanjaan disebuah pemrintahan sertamemberikan sebuah landasan sebagai upaya guna memperoleh sebuah penghasilan/pendapatan serta pembiayaan untuk periode annggaran tahunan.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan pemikiran dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan datang.

2.2.2. Jenis-Jenis Anggaran

Menurut Supriyono (2013:65) Anggaraan dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut dasar penyusunan
 - a. Anggaran variabel
 - b. Anggaran tetap
- 2) Menurut cara penyusunan

- a) Anggaran periodik
- b) Anggaran kontinu
- 3) Menurut jangka waktu
 - a) Anggaran jangka pendek
 - b) Anggaran jangka panjang
- 4) Menurut bidangnya
 - a) Anggaran operasional
 - b) Anggaran keuangan
- 5) Menurut kemampuan menyusun
 - a) Anggaran komprehensif
 - b) Anggaran parsial
- 6) Menurut Fungsinya
 - a) Anggaran apropriasi
 - b) Anggaran kinerja

2.2.3. Fungsi Anggaran

Menurut Nurlan Darise (2008:133), Fungsi anggaran dilingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

- c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintahan.
- e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Wuryan Andayani (2007:63), mengemukakan bahwa anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Anggaran merupakan kesepakatan kebijakan yang digunakan untuk kepentingan publik.
- b. Anggaran menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sesuai tujuan yang ingin dicapai.
- c. Anggaran menjadi kekuatan hukum dan landasan pelaksanaan APBD.
- d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- e. Hasil pelaksanaan anggaran dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan.

Mardiasmo (2005:63), mengemukakan beberapa fungsi anggaran yaitu :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Anggaran merupakan *Control Tool* (alat pengendali)

Dalam hal ini anggaran berperan sebagai pemberi perencanaan secara detail atau sebuah penghasilan serta pengeluaran dipemerintahan supaya pembelanjaan yang dikerjakan bisa dipertanggung jawabkan kepada pihak publik.

3. Anggaran merupakan alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Dalam hal ini, anggaran dipakai sebagai sebuah alat kebijakan fiskal dipemerintahan yang dipakai didalam menstabilkan perekonomian serta mendorong tumbuhnya perekonomian. Melalui anggaran publik ini maka bisa diketahui arah kebijakan fiskal pemerintahan yang kemudian bisa dibuat sebuah prediksi-prediksi dan estimasi perekonomian.

4. Anggaran merupakan sebuah media politik (*Political Tool*)

Dalam hal ini, anggaran dipakai sebagai alat untuk memutuskan prioritas serta kepeluan keuangan lain kepada prioritas yang dimaksud. Disektor publik ini, anggaran adalah sebuah dokumen politik yang merupakan bentuk komitmen eksekutif serta kesepakatan legislatif mengenai pemakaian dana publik guna sebuah urusan tertentu.

5. Anggaran merupakan suatuperalatan didalammengkoordinasi dan pengkomunikasian (*Coordinationand Communication Tool*).

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam

pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada para pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran,

7. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, agar dapat memotivasi pegawai anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Public Sphere*).

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD, Masyarakat, LSM, Perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mohamad Mahsun (2006:81)

Ihyaul Ulum (2005:113), mengemukakan fungsi anggaran sebagai berikut:

1. Anggaran Negara berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola Negara untuk suatu periode di masa mendatang.
2. Anggaran juga berfungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran Negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.
3. Anggaran mempunyai fungsi sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada MPR.

Berikut ini ada tujuh fungsi dari sebuah anggaran sektor publik menurut Indra Bastian (2006 : 164), yaitu :

- 1) Anggaran adalah sebuah cetak biru kegiatan yang dilakukan dimasa yang akan datang.
- 2) anggaran adalah pencapaian diakhir proses didalam menyusun perencanaan kerja.
- 3) Anggaran merupakan sebuah alat pengkomunikasian internal yang menghubungkan beberapa unit kerja serta cara kerja atasan dan bawahan.

- 4) Anggaran adalah sebuah instrumen politik.
- 5) Anggaran adalah sebuah instrumen kebijakan fiskal.
- 6) Anggaran merupakan suatu alat didalam memotivasi serta persuasi tindakan efektif serta efisien didalam mencapai visi disuatu organisasi.
- 7) Anggaran merupakan sebuah alat pengendali unit kerja.

Sedangkan berdasarkan Pasal 16 Permendagri No. 13 tahun 2006, terdapat 5 fungsi dari APBD yaitu :

- 1) Anggaran daerah yang dijadikan sebagai sebuah acuan didalam melakukan pendapatan serta pembelanjaan ditahun yang bersangkutan disebut dengan otorisasi.
- 2) Anggaran daerah yang dijadikan sebuah pedoman untuk pihak manajemen didalam melakukan perencanaan aktivitas pada tahun yang bersangkutan disebut dengan perencanaan.
- 3) Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- 5) Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2.2.4. Tujuan Anggaran

Tujuan anggaran menurut Nafarin (2007:13) adalah sebagai berikut :

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dari investasi dana.
2. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan.
4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

2.3. Belanja Daerah

Menurut PSAP No.2 Paragraf 7 adalah : belanja daerah merupakan total pengeluaran kas negara/daerah yang mengurangi surplus anggaran selama tahun anggaran dan tidak diganti oleh pemerintah.

Sedangkan Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dalam Permendagri No 57 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan 19 Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua “Belanja Daerah Didefinisikan Sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”

Zulia Hanum (2011) Belanja daerah dimasukkan dalam APBD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Istilah belanja merupakan konsep pengeluaran termasuk dalam laporan kinerja anggaran, karena penyusunan anggaran kinerja masih bekerja secara tunai. Belanja pemerintah daerah berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang tidak disediakan oleh swasta serta mengendalikan berbagai aspek perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Pengeluaran Pemerintah Nilai aset bersih dikurangi dalam satu tahun periode, belanja didefinisikan sebagai pembelian yang dibagi menjadi kategori ekonomi (jenis pembelian), organisasi dan fungsi. Alokasi ekonomi adalah sekumpulan biaya berdasarkan jenis biaya untuk melakukan suatu aktivitas.

Belanja Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi :

1. Belanja Operasional

Biaya operasional adalah pengeluaran anggaran yang memberikan manfaat jangka pendek kepada pemerintah pusat. Biaya operasional meliputi:

- a. Belanja Pegawai.
- b. Belanja Barang.
- c. Bantuan Sosial.
- d. Bunga.
- e. Hibah.
- f. Subsidi.

2. Belanja Modal.

Biaya modal adalah pengeluaran lokal untuk memperoleh aset berwujud yang memberikan manfaat selama satu periode akuntansi.

Biaya perolehan aset tetap dalam belanja modal adalah harga beli/bangunan dan biaya yang terkait dengan pembelian/pengembangan aset selama aset digunakan. Biaya modal meliputi:

- a. Belanja modal tanah.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan.
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.
- e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud).

3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga.

Belanja Lain-lain (bencana) yang tidak terjangkau dan tidak boleh terulang kembali, seperti penanggulangan bencana, bencana sosial, dan kebutuhan pemerintah pusat lainnya.

4. Belanja Transfer.

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari unit pelaporan yang lebih tinggi ke unit pelaporan yang lebih rendah, seperti pengeluaran neraca dari pemerintah kabupaten ke pemerintah kabupaten/kota, dan dana distribusi pendapatan dari kabupaten/kota. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi modal dana yang merupakan kewajiban daerah selama tahun anggaran dan tidak akan diganti oleh provinsi.

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana Telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 Tentang perubahan yang kedua, belanja dikelompokkan sebagai berikut :

1. Belanja Langsung

Biaya langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung melalui program dan kegiatan.

Belanja langsung terdiri dari :

- a. Belanja pegawai.
- b. Belanja modal.
- c. Belanja barang dan jasa.

2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah pengeluaran anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi lagi berdasarkan jenis belanja :

- a. Belanja bunga.
- b. Belanja hibah.
- c. Belanja subsidi.
- d. Belanja bantuan sosial.
- e. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota pemerintahan desa.

2.4. Laporan Realisasi Anggaran

2.4.1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang memberikan gambaran umum tentang sumber daya, distribusi, dan pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dan membandingkan kinerja selama periode waktu tertentu dengan anggaran.

Standar Akuntansi Pemerintahan (2010 : 70) mendefinisikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dan periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang penganggaran dan pelaksanaan pendapatan, belanja, surplus/defisit LRA dan pendanaan entitas pelapor. Informasi ini berguna bagi pengguna laporan saat mengevaluasi keputusan terkait alokasi anggaran, akuntabilitas, dan kepatuhan oleh entitas pelapor, karena mencakup informasi berikut:

1. Informasi tentang alokasi dan penggunaan sumber daya dan sumber daya ekonomi.

2. Informasi umum kinerja anggaran yang berguna untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya keuangan yang diperlukan untuk kegiatan pemerintah pusat dan daerah di masa depan.

Menurut Elizar Sinambela Fitriani Saragih (2008) Realisasi anggaran pendapatan dari Laporan Pelaksanaan Anggaran. Laporan ini merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang sangat penting karena anggaran pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini memainkan peran utama dalam stabilisasi, apropriasi, alokasi sumber daya publik, perencanaan manajemen organisasi, dan tinjauan kinerja.

2.4.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Adalah mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan .

2.4.3. Komponen Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan LRA

Pendapatan negara/daerah merupakan iuran rakyat yang diamanakan kepada pemerintah, sehingga pendapatan LRA disusun

untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

2. Belanja

Belanja adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit anggaran (*allotment*).

Belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukue efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

3. Surplus/Defisit – LRA

Surplus – LRA adalah selisih antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Defisit – LRA adalah selisih kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit – LRA dilakukan ditingkat pemerintah pusat atau daerah melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses konsolidasi.

4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun bertahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran publik terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5. Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

2.5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

2.5.1. Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan serta pembelanjaan daerah (APBD) adalah sebuah perencanaan aktivitas dipemerintahan daerah yang dicantumkan dalam bentuk angka serta menunjuk kepada adanya sumber penerimaan yang bagian dari sasaran minimal serta biaya yang bagian dari batas maksimal yang digunakan disebuah periode anggaran, (Abdul Halim, 2002 : 24). Sedangkan menurut peraturan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, APBD merupakan sebuah perencanaan aktivitas tahunan daerah yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah mengenai APBD. Melalui instruksi yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perbaikan karena adanya Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengenai pokok-pokok kebijaksanaan didalam menyusun anggaran serta pembelanjaan daerah ditahun anggaran 1999/2000 yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib secara nyata mencerminkan niat pemerintahan daerah serta memnuhi keinginan masyarakat didalam melaksanakan beberapa per uhan didalam penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan yang di selaraskan melaui prinsip keadilan serta kehati-hatian didalam mengelola anggaran.

- Melaksanakan penghematan serta dibarengi dengan meningkatkan kedisiplinan anggaran.
- Lebih mengetatkan serta memperbaiki mekanisme penggunaan anggaran agar bisa terhindarkan dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
- Melakukan peningkatan prioritas serta pembelanjaan yang rasional.

Didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa anggaran pendapatan serta Belanja Daerah yang kemudian dikatakan dengan APBD merupakan sebuah perencanaan keuangan

tahunan pemerintah daerah yang di bahas serta disetujui oleh pemerintahan daerah serta DPRD yang kemudian ditetapkan sebuah peraturan daerah yang dicantumkan didalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintahan yang menjelaskan bahwa anggaran pendapatan serta pembelanjaan daerah merupakan sebuah perencanaan kegiatan tahunan pemerintahan daerah yang sudah disetujui oleh DPRD. APBD merupakan sebuah penganggaran daerah.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pengertian APBD, maka bisa menyatakan bahwa sebuah anggaran daerah termaksud juga APBD, mempunyai beberapa unsur, yaitu :

- Perencanaan suatu kegiatan disebuah daerah, serta penjelasan dengan lebih detail.
- Munculnya sumber penerimaan yang merupakan sebuah target minimal didalam menutupi pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan, serta munculnya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- Periode anggaran, biasanya satu (1) Tahun.

Mohamad Mahsun (2006:146), mengemukakan bahwa APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya selama satu tahun anggaran. Dalam

konteks pengukuran kinerja berbasis anggaran tidak bisa dilepaskan pemahaman kita terhadap tiga siklus utama dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- (1) perencanaan.
- (2) pelaksanaan.
- (3) pengawasan/pengendalian.

Ketiga proses tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena ketiganya merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah. Fokus pengukuran kinerja berbasis anggaran sebenarnya adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah yaitu sejauh mana, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Margono (2010:25) anggaran adalah pengeluaran dalam rekening keuangan umum negara/daerah yang mengurangi modal dana berjalan selama tahun anggaran dan tidak diganti oleh pemerintah.

Menurut Moito (2009:119) anggaran pendapatan belanja daerah dapat mencerminkan kinerja dan kapasitas pemerintah daerah dalam mendanai dan mengatur pemerintah daerah selama tahun anggaran dan dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.

2.5.2. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Menurut Widjajanta et al (2014:20) Fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebagai berikut :

- Fungsi otoritas, yaitu Anggaran daerah akan menjadi dasar bagi pendapatan dan pengeluaran tahun-tahun berikutnya.
- Fungsi perencanaan, yaitu Anggaran daerah memandu perencanaan kegiatan sepanjang tahun.
- Fungsi pengawasan, yaitu Anggaran daerah akan menjadi pedoman untuk memutuskan apakah fungsi pemerintahan negara harus dipenuhi.

- Fungsi alokasi, yaitu Anggaran daerah harus bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi ekonomi dengan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya.
- Fungsi distribusi, yaitu Anggaran daerahlah yang harus diperlakukan dengan rasa keadilan dan rasa hormat.
- Fungsi stabilisasi, yaitu Anggaran daerah merupakan alat untuk menyeimbangkan dan memelihara fundamental ekonomi.

2.5.3. Unsur-Unsur Anggaran Dan Belanja Daerah

APBD berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 5

Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah , APBD

Pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai Rencana Keuangan dan Operasional, yang di satu sisi menentukan pengeluaran maksimum yang direncanakan untuk operasi dan proyek keuangan selama tahun anggaran, dan di sisi lain, menentukan pendapatan yang direncanakan dan sumber pendapatan daerah.

Unsur-unsur anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut :

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya
- 3) Beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya dan beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.

- 4) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 5) Periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.

2.6. Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahmudi (2010:34), Analisis pendapatan dan belanja daerah secara umum terlihat dari laporan realisasi anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan dan belanja untuk menilai apakah penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ekonomis, efektifitas dan, efisiensi antara lain dengan cara :

1) Analisis varians pendapatan

Dalam hal belanja terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan.

Analisis varians pendapatan merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan Analisis varians pendapatan mempunyai tujuan sebagai sebuah alat untuk mengetahui nilai selisih lebih serta selisih kurang pendapatan. Dibawah ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung hasil selisih

tersebut :

$$\text{Selisih Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Dana Realisasi} - \text{Pendapatan Dana yang Dianggarkan}}{\text{Pendapatan Dana yang Dianggarkan}}$$

Keterangan :

Selisih Pendapatan : SP

Pendapatan Dana Realisasi : PR

Pendapatan Dana yang Dianggarkan : PA

Sedangkan berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai presentase selisih dari sebuah anggaran pendapatan, yaitu :

$\frac{\text{Selisih Anggaran pendapatan}}{\text{Besarnya Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$

Analisis varians anggaran pendapatan ini dilaksanakan melalui perhitungan nilai selisih antar realisasi pendapatan dengan anggaran. Pada umumnya selisih tersebut telah di informasikan didalam sebuah Laporan Realisasi Anggaran yang diberikan dari pemerintah daerah. Informasi mengenai nilai selisih anggaran itu sangat membantu bagi pihak pemakai laporan tersebut untuk melakukan pemahaman serta melakukan analisa mengenai kinerja pendapatan. Didalam kegiatan analisis ini ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh pembaca laporan, yaitu :

- a. Lebih memperhatikan nilai selisih anggaran pendapatan serta pelaksanaannya baik secara nominal ataupun presentase.

- b. Menetapkan tingkatan selisih yang bisa ditolerir ataupun dianggap wajar.
- c. Menilai apakah nilai selisih tersebut signifikan atau tidak jika ditinjau dari jumlah pendapatan.
- d. Melakukan analisa penyebab terjadinya sebuah selisih anggaran.

Sebenarnya, anggaran pendapatan adalah sebuah batasan minimal dari total pendapatan yang sudah dijadikan target yang harus didapatkan oleh pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dikatakan mempunyai kinerja pendapatan yang baik jika bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dari total yang sudah dianggarkan, namun jika realisasi pendapatan di bawah total anggaran, maka hal tersebut dinilai kurang baik. Jika sasaran pendapatan bisa didapatkan atau melebihi, maka hal tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan karena hal tersebut dianggap wajar, namun jika sasaran pendapatan tidak sesuai maka hal ini membutuhkan perhatian yang lebih lanjut yang berkaitan dengan mengapa sasaran/target tersebut tidak bisa dicapai. Selisih lebih realisasi pendapatan adalah sebuah selisih yang diinginkan, sedangkan untuk selisih kurang merupakan suatu hal yang tidak diinginkan.

2) Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi Adalah Rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio derajat desentralisasi juga menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam

pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Derajat Desentralisasi dihitung dengan cara membandingkan antara total pendapatan asli daerah dengan jumlah penerimaan daerah. Rasio ini menunjuk kepada derajat kontribusi PAD terhadap jumlah penerimaan daerah. dengan meningkatkan kontribusi PAD, maka kemampuan pemerintahan daerah didalam melaksanakan desentralisasi juga semakin meningkat. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan didalam menghitung nilai derajat desentralisasi, yaitu sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Nilai dari rasio ini bisa didapatkan dengan cara melakukan perbandingan antara total pendapatan transfer yang didapatkan dari penerimaan daerah dengan jumlah penerimaan daerah. Dengan meningkatnya nilai dari rasio ini maka semakin meningkat juga tingkatan ketergantungan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah pusat serta pemerintah provinsi. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan dalam memperoleh nilai dari rasio ini, yaitu :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

4) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini dilakukan dengan cara melakukan perbandingan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan. Berikut ini merupakan rumus menghitung rasio efektifitas dan pendapatan asli daerah, yaitu :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Secara umum, nilai efektivits PAD dapat dikategorikan sebagai berikut

Tabel 2.1

Nilai Efektif Pendapatan Asli Daerah

Persentase	Kategori
< 75 %	Tidak efektif
75 – 89 %	Kurang efektif
90 – 99 %	Cukup Efektif
100 %	Efektif
> 100 %	Sangat Efektif

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka

berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efisien PAD dapat di kategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Nilai Efisien Pendapatan Asli Daerah

Kategori	Persentase
Sangat efisien	< 10%
Efisien	10-20%
Cukup efisien	21-30%
Kurang efisien	31-40%
Tidak efisien	>40

5) Analisis varians belanja

Analisis ini adalah sebuah alat analisis terhadap suatu perbedaan ataupun selisih antara realisasi pembelanjaan dengan anggaran. Analisis ini cukup sederhana tetapi bisa menyediakan sebuah informasi yang

berguna. Dalam melakukan analisa varians belanja maka harus memperhatikan :

- Menanyakan apa alasan terjadinya suatu varians, dan apakah selisih tersebut bisa menjadi sebuah alan serta bisa dipertanggung jawabkan.
- Berapakah besar varians tersebut, apakah totalnya sudah sesuai atau belum.

6) Rasio efisiensi belanja

Sebuah kegiatan membandingkan realisasi pembelanjaan dengan anggaran pembelanjaan merupakan rasio efisiensi belanja. Rasio ini dipakai dalam melakukan pengukuran tingkatan dalam menghemat anggaran yang dilaksanakan pemerintah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mendapat ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu yang beragam. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Palilingan	Analisis Kinerja	Hasil penelitian ini

	(2015)	Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado.	menunjukkan bahwa analisis kinerja belanja publik Manado secara umum diperhitungkan. Kota Manado berkinerja baik dengan rata-rata 90,75% antara tahun 2009 dan 2013.
2	Marchelino Daling (2013)	Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	Hasil penelitian ini yang disimpulkan oleh peneliti Kinerja kinerja sangat efektif yaitu rata-rata 97,91% dibandingkan anggaran minimal. Sementara itu, pelaksanaan anggaran yang menguntungkan tercermin dari kecilnya anggaran yang dialokasikan yang berkontribusi pada profitabilitas SILPA.
3	Rukayah (2017)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Metode Rasio	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada tahun 2014-2016 badan perijinan terpadu dan

		Efektif Dan Rasio Efisien Pada Kantor Badab Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.	penanaman modal kabupaten serang termasuk kriteria sangat efektif hal ini dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efektifnya yang diperoleh sebesar 102%, dan pada rasio efisiennya dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efisiennya yang diperoleh sebesar 92% hal ini termasuk dalam kriteria kurang efisien.
4	Andre P. Tulangow Treesje Runtu (2016)	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten minahasa dalam tiga tahun penelitian pemerintah kabupaten minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Berbeda dengan belanja daerah dalam tiga tahun yang sama pemerintah kabupaten minahasa sudah baik dalam

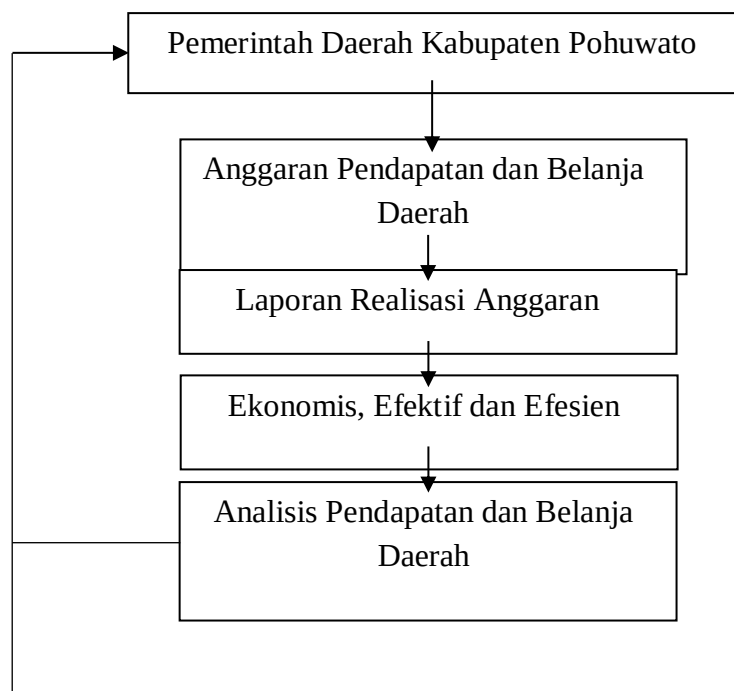
			merealisasikan belanja dengan tidak melebihi dengan jumlah yang diangarkan.
5	Liando (2016)	Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kepulauan Sangihe.	Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan analisis varians belanja pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2011-2014 menunjukan bahwa kinerja belanja pemerintahan kabupaten kepulauan sangihe dinilai baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahun dalam pemanfaatan realisasi belanja.

2.8. Kerangka Pemikiran

Didalam mengelola keuangan daerah bisa berpengaruh besar terhadap nasib sebuah daerah hal ini disebabkan karena daerah bisa menjadi daerah yang kuat serta berkuasa dan bisa meningkatkan kekuasaannya ataupun jadi tidak berdaya ya ini tergantung dari cara pemerintah melakukan pengelolaan keuangannya. Dengan mengelola daerah secara ekonomis,

efisien, serta efektif ataupun bisa memenuhi *value of money*, partisipasi, sifat transparan, akuntabilitas serta keadilan yang bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang kemudian bisa menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Didalam mengelola daerah bukan hanya diperlukan SDMnya saja namun sumber daya ekonomi juga sangat dibutuhkan yang dicantumkan didalam sebuah penganggaran pemerintahan daerah. Adapun bagan Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran



BAB III

OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil objek dari laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam hal ini laporan realisasi anggaran tahun 2018-2020.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau berupa angka-angka. Dalam hal ini data dari laporan Realisasi Anggaran
- b. .Data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur, namun berupa keterangan-keterangan antara lain keterangan mengenai Objek yang diteliti yaitu laporan realisasi anggaran .

3.2.2 Sumber Data

Data yang diperoleh dari obyek penelitian berupa data sekunder yang diambil dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

3.3. Teknik pengumpulan data

1. Metode kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat teoritis yang bersumber dari berbagai literatur, penelitian pihak lain dan laporan yang dipublikasikan untuk mendapatkan gambaran untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang diteliti serta analisis penelitian yang akan dilakukan.
2. Metode Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diperlukan berupa laporan realisasi anggaran.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan merujuk pada Mahmudi (2010: 34), bahwa Analisis pendapatan dan belanja daerah melalui laporan realisasi anggaran, untuk dapat melakukan analisis pendapatan dan belanja untuk menilai apakah penggunaan anggaran pendapatan dan belanja ekonomis, efektifitas, dan efisiensi dengan menggunakan alat analisis antara lain :

1. Analisis varians pendapatan

$$\text{Selisih pendapatan} = \text{Pendapatan Dana Realisasi} - \text{Pendapatan Dana yang Dianggarkan}$$

Keterangan:

Selisih pendapatan : SP

Pendapatan dana realisasi : PR

pendapatan dana yang sudah dianggarkan : PA

Agar besar kecilnya tingkatan presentase selisih dari anggaran bisa diketahui, maka digunakan rumus berikut ini :

$$\frac{\text{Selisih Anggaran pendapatan}}{\text{Besarnya Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Nilai Efektiv Pendapatan Asli Daerah

Kategori	Persentase
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100 %
Cukup Efektif	90-99%
Kurang Efektif	75-89 %
Tidak Efektif	< 75 %

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan tabel pengkategorian nilai efisiensi PAD, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2

Nilai Efisien Pendapatan Asli Daerah

5. Analisis	Presentase	Kategori
	< 10 %	Sangat efisien
	10 - 20 %	Efisien
	21 – 30 %	Cukup efisien
	31 – 40 %	Kurang efisien
	>40 %	Tidak efisien

varians belanja

$$SB= RB-BA$$

Dimana:

SB= Selisih Belanja

RB= realisasi Belanja

BA= Pendapatan yang dianggarkan

Untuk mengetahui besarnya tingkat persentase selisih dari anggaran belanja digunakan rumus:

$\frac{\text{Selisih Anggaran Belanja}}{\text{Besarnya Anggaran Belanja}} \times 100\%$

6. Rasio efisiensi belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejak terbentuknya Kabupaten Pohnuato sebagai daerah pemekaran pada bulan Oktober 2003, pengelolaan keuangan Kabupaten Pohnuato masih dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mini yang merupakan pelimpahan sebagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo sebagai kabupaten induk. Organisasi keuangan daerah ini adalah Badan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohnuato dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohnuato.

Seiring dengan perkembangan waktu dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 01 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kabupaten Pohuwato, perbedaan dengan periode sebelumnya adalah sejak tahun 2013, Badan Pendapatan tidak lagi menjadi bagian dalam organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah. Bidang pendapatan berubah status berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah.

Kepemimpinan Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah sudah tiga mengalami pergantian, dimana pada periode 2012 sampai sekarang di pimpin oleh Drs. Ahmad Djuuna, dan dalam perjalanan Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah, prestasi yang diraih adalah penghargaan berprestasi

berdasarkan kinerja keuangan dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK RI tahun 2013 dan tahun 2014, Rangkin 2 SKPD berkinerja tinggi, terbaik III penataan Kantor dan Halaman dan beberapa prestasin di bidang olahraga dan seni budaya.

4.2. Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis varians pendapatan

Selisih Pendapatan = Pendapatan Dana Realisasi – Pendapatan Dana
yang Dianggarkan

$$\text{Tahun 2018} = 904.691.929.792 - 924.940.297.080 = \\ (20.248.367.288)$$

$$\text{Tahun 2019} = 970.534.277.246 - 996.284.671.188 = \\ (25.750.393.941)$$

$$\text{Tahun 2020} = 955.946.119.926 - 970.534.277.246 = \\ (33.185.897.716)$$

Tabel 4.1

Analisis varians pendapatan

Keterangan	2018	2019	2020
Pendapatan dana realisasi	904.691.929.792	970.534.277.246	955.946.119.926
pendapatan dana yang dianggarkan	924.940.297.080	996.284.671.188	970.534.277.246
Hasil :	(20.248.367.288)	(25.750.393.941)	(33.185.897.716)

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

Presentase selisih dari anggaran bisa diketahui, maka

digunakan rumus berikut ini :

$$\text{Selisih Anggaran} = \frac{\text{Selisih Anggaran pendapatan}}{\text{Besarnya Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{20.248.367.288}{924.940.297.080} \times 100\% \\ &= 2,18 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2019} &= \frac{25.750.393.941}{996.284.671.188} \times 100\% \\ &= 2,58\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2020} &= \frac{33.185.897.716}{970.534.277.246} \times 100\% \\ &= 3,41\%\end{aligned}$$

Tabel 4.2

Selisih Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Keterangan	2018	2019	2020
Selisih Anggaran Pendapatan Asli Daerah	20.248.367.288	25.750.393.941	33.185.897.716
Besarnya Anggaran Pendapatan	924.940.297.080	996.284.671.188	970.534.277.246
Hasil	2,18 %	2,58%	3,41%

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2022

4.2.2 Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2018} &= \frac{52.151.698.921}{904.691.929.792} \times 100\% \\ &= 5,76\%\end{aligned}$$

$$62.337.943.760$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2019} &= \frac{\quad}{970.534.277.246} \times 100\% \\ &= 6,42\%\end{aligned}$$

Keterangan	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	52.151.698.921	62.337.943.760	50.953.585.078

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2020} &= \frac{50.953.585.078}{955.946.119.926} \times 100\% \\ &= 5,33\%\end{aligned}$$

Tabel 4.3

Derajat Desentralisasi

Total Pendapatan	904.691.929.792	970.534.277.246	955.946.119.926
Hasil	5,76%	6,42%	5,33%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018 – 2020

4.2.3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{828.345.870.871}{52.151.698.921} \times 100\% \\ &= 1,588 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{880.890.770.953}{62.337.943.760} \times 100\% \\ &= 1,413\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{873.954.766.371}{50.953.585.078} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 1,715\%$$

Tabel 4.4

Rasio ketergantungan daerah

Keterangan	2018	2019	2020
Pendapatan Transfer	828.345.870.871	880.890.770.953	873.954.766.371
Total Pendapatan Asli Daerah	52.151.698.921	62.337.943.760	50.953.585.078
Hasil	1,588%	1,413%	1,715%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

4.2.4 Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{52.151.698.921}{60.636.332.336} \times 100\% \\ &= 86\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{62.337.943.760}{66.564.152.234} \times 100\% \\ &= 93,65\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{50.953.585.078}{74.201.375.007} \times 100\% \end{aligned}$$

= 68,66%

Tabel 4.5

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah

Keterangan	2018	2019	2020
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	52.151.698.921	62.337.943.760	50.953.585.078
Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	60.636.332.336	66.564.152.234	74.201.375.007
Hasil	86 %	93,65%	68,66%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

Secara umum, nilai efektivits PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Kategori	Persentase
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100 %
Cukup Efektif	90-99%
Kurang Efektif	75-89 %
Tidak Efektif	< 75 %

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah Biaya
Pemer

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2018} &= \frac{60.636.332.336}{52.151.698.921} \times 100\% \\ &= 116,26\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2019} &= \frac{66.564.152.234}{62.337.943.760} \times 100\% \\ &= 106,77\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2020} &= \frac{74.201.375.007}{50.953.585.078} \times 100\% \\ &= 145,62\%\end{aligned}$$

Tabel 4.6

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Keterangan	2018	2019	2020
Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah	60.636.332.336	66.564.152.234	74.201.375.007
Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	52.151.698.921	62.337.943.760	50.953.585.078
Hasil	116,26%	106,77%	145,62%

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

Berikut ini merupakan tabel pengkategorian nilai efesiensi PAD, yaitu sebagai berikut :

Presentase	Kategori
< 10 %	Sangat efisien
10 - 20 %	Efisien
21 – 30 %	Cukup efisien
31 – 40 %	Kurang efisien
>40 %	Tidak efisien

4.2.5 Analisis varians belanja

Selisih Belanja = Realisasi Belanja – Belanja yang Dianggarkan

Tahun 2018 = 758.514.064.354 – 808.702.870.684 =
(50.188.806.330)

Tahun 2019 = 827.465.026.349 – 865.037.328.039 =
(37.572.301.689)

Tahun 2020 = 812.324.184.587 – 855.941.060.021 =
(43.616.875.434)

Tabel 4.7

Realisasi Belanja Dan Anggaran Belanja

Keterangan	2018	2019	2020
------------	------	------	------

Realisasi Belanja	758.514.064.354	827.465.026.349	812.324.184.587
Belanja yang dianggarkan	808.702.870.684	865.037.328.039	855.941.060.021
Hasil	(50.188.806.330)	(37.572.301.689)	(43.616.875.434)

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020
Untuk mengetahui besarnya tingkat persentase selisih dari

anggaran belanja digunakan rumus:

$$\frac{\text{Selisih Anggaran Belanja}}{\text{Besarnya Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{758.514.064.354}{808.702.870.684} \times 100\% \\ = 6,20\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{37.572.301.689}{865.037.328.039} \times 100\% \\ = 4,34\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{43.616.875.434}{855.941.060.021} \times 100\% \\ = 5,09\%$$

Tabel 4.8

Selisih Anggaran

Keterangan	2018	2019	2020
Selisih Anggaran Belanja	50.188.806.330	37.572.301.689	43.616.875.434

S u m b e r : L a			
Besarnya Anggaran Belanja	808.702.870.684	865.037.328.039	855.941.060.021
Hasil	6,20 %	4,34 %	5,09%

poran Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

4.2.6 Rasio efisiensi belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{758.514.064.354}{808.702.870.684} \times 100\% \\ &= 93,79\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{827.465.026.349}{865.037.328.039} \times 100\% \\ &= 95,65\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{812.324.184.587}{855.941.060.021} \times 100\% \\ &= 94,90\% \end{aligned}$$

Tabel 4.9

Rasio efisiensi belanja

Keterangan	2018	2019	2020
Realisasi Belanja	758.514.064.354	827.465.026.349	812.324.184.587

Anggaran Belanja	808.702.870.684	865.037.328.039	855.941.060.021
Hasil	93,79 %	95,65 %	94,90%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Pohuwato tahun 2018-2020

4.3. Pembahasan

4.3.1 Analisis varians pendapatan

Hasil Analisis varians pendapatan menunjukkan bahwa adanya selisih kurang pendapatan (*unfavourable variance*) atau selisih yang tidak diharapkan yang mana Anggaran Pendapatan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.924.940.297.080 dan terealisasi sebesar Rp. 904.691.929.792 yang menunjukkan adanya selisih kurang pendapatan sebesar (Rp.20.248.367.288), Pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.996.284.671.188 dan terealisasi sebesar Rp.970.534.277.246 dan tingkat persentase antara selisih anggaran pendapatan dan besarnya realisasi pendapatan pada tahun 2018 sebesar 2,18 %, 2019 sebesar 2,58 % dan tahun 2020 sebesar 3,41 % melihat hasil analisis tersebut kinerja pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dapat dinilai kurang baik, Adapun salah satu penyebab tidak tercapainya target pendapatan karena kurangnya realisasi dari penerimaan retribusi daerah.

4.3.2 Derajat Desentralisasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah mencapai 5,76 % tahun 2018, 6,42 tahun 2019 dan 5,33 % pada tahun 2020 arti kontribusi pendapatan asli daerah tidak mampu menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dapat dilihat dari target anggaran dengan realisasinya mengalami selisih kurang.

4.3.3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya jumlah pendapatan transfer yang lebih besar di bandingkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari besarnya pendapatan transfer tahun 2018 sebesar Rp.828.345.870.871 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 52.151.698.921 dengan persentase 1,588%. Tahun 2019 sebesar Rp.880.890.770.953 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 62.337.943.760 dengan persentase 1,413 % dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 873.954.766.371 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.50.953.585.078 dengan persentase 1,715% Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten pohuwato terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat Tinggi.

4.3.4 Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai dengan yang ditargetkan dimana tingkat efektifitas pada tahun

2018 sebesar 86 % ini masuk kategori kurang efektif, tahun 2019 sebesar 93,65% ini masuk pada kategori cukup efektif dan pada tahun 2020 kembali menurun sebesar 68,66% ini juga masuk dalam kategori tidak efektif, dengan kata lain kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak efektif .

4.3.5 Analisis Varians Belanja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa target anggaran belanja mengalami selisih lebih kurang, yang mana target anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp. 808.702.870.684 terealisasi sebesar Rp. 758.514.064.354 dengan tingkat persentase antara selisih anggaran belanja dengan besarnya anggaran belanja sebesar 93,79 % . Tahun 2019 sebesar Rp. 865.037.328.039 terealisasi sebesar Rp. 827.465.026.349 dengan tingkat persentase antara selisih anggaran belanja dengan besarnya anggaran belanja sebesar 95,65% dan pada tahun 2020 target anggaran belanja sebesar 855.941.060.021 dengan tingkat persentase antara selisih anggaran belanja dengan besarnya anggaran belanja sebesar 94,90%. Salah satu penyebab terjadinya selisih lebih anggaran belanja adalah karena anggaran belanja tak terduga yang mana target anggaran tahun 2018, 2019 dan 2020 sangat besar sedangkan realisasinya hanya sedikit.

4.3.6 Rasio Efisiensi Belanja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran dilihat dari tahun 2018

besarnya realisasi belanja Rp.758.514.064.354 dengan anggaran belanja Rp.808.702.870.684 menunjukkan adanya selisih kurang penggunaan anggaran dengan tingkat persentase 93,79 %,tahun 2019 besarnya realisasi belanja Rp.827.465.026.349 dengan anggaran belanja Rp.865.037.328.039 menunjukkan adanya selisih kurang penggunaan anggaran dengan tingkat persentase 95,65 % dan tahun 2020 besarnya realisasi belanja Rp.812.324.184.587 dengan anggaran belanja Rp.855.941.060.021 menunjukkan adanya selisih kurang penggunaan anggaran dengan tingkat persentase 94,90% dengan kata lain kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan sudah efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah:

1. Penggunaan Anggaran Pendapatan yang dilihat dari sisi kinerja pendapatan dinilai kurang baik karena kontribusi pendapatan asli daerah tidak mampu menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan desentralisasi, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang efektif.
2. Penggunaan Anggaran Belanja menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan sudah efisien.

5.2. Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada maka saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah disarankan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato agar lebih meningkatkan sumber penerimaan yang ada di daerah dan meminimalkan pengeluaran-pengeluaran yang kurang penting serta ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pusat agar kedepannya lebih mandiri lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

_____. 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

Andre P. Tulangow Treesje Runtu. 2016. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa*. Jurnal Emba Vol 4 No.3 September 2016 : 564-571.

- Deddi Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta :Salemba Empat.
- Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan : Salemba Empat.
- Elizar Sinambela.(2008). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Ihyauly Ulum. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang pers.,
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Liando. 2016. *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kepulauan Sangihe*. Jurnal Emba Vol.4 No. 1 Maret 2016 : 1473-1484.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta
- Marchelino Daling. 2013. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Emba Vol.1 No.3 September 2013 : 82-89.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta
- Margono. 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan.
- Mohamad Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. yogyakarta: BPFE.
- Moito. 2009. *Studi Pembangunan*. Jakarta : PT.Gramedia Buku Utama.
- Nafarin. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurlan Darise. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Penerbit Indeks.

Palilingan. 2015. *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado*. Jurnal Emba Vol.3 No.1 Maret : 17-25.

Rukayah. 2017. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Metode Rasio Efektif Dan Rasio Efisien Pada Kantor Badab Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*. Jurnal Akuntansi Vol.4 No.2 Juli : 1-11.

Supriyono. 2013. *Akuntansi Biaya, Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Serta Pembuatan Keputusan*. Yogyakarta.

Widjajanta, B. 2014. *Ekonomi Dan Akuntansi*. Mengasah Kemampuan Ekonomi, 20-22. CV Citra Praya.

Wuryan Andayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang : Bayu Media Publishing

Zulia Hanum. 2010. *Analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kabupaten serdang badagai*. Jurnal Ilmiah dan Bisnis Vol.11 No.1 April : 1-23.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negara No. 13 tahun 2006. Tentang *Pedoman Pengelola Keuangan*.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 02, Tentang *Realisasi Anggaran Paragraf 7*. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002. Tentang *Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Sebagai Perubahan Atas
Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang *Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

JADWAL PENELITIAN

[illegible]

[illegible]

ABSTRACT

CINDRI MANGELA. E1119131. ANALYSIS OF BUDGETS, REVENUE, AND EXPENDITURE IN POHUWATO REGIONAL GOVERNMENTS (A CASE STUDY AT THE REGIONAL FINANCE AGENCY)

This study aims at finding whether the use of the regional budget for revenues and expenditures in the local government of Pohuwato Regency had been carried out economically, efficiently, and effectively. The method used in this study is by analyzing the budget realization report to assess whether the use of the revenue and expenditure of the budget has been carried out economically, effectively, and efficiently. The results of this study indicate that: 1) The use of the revenue of the budget, in terms of revenue performance, is considered poor. The contribution of local revenue does not show the ability of local governments to implement decentralization. The level of dependence of the Pohuwato Regency Government on central government transfers is still very high. The ability of local governments to mobilize revenue from local revenue is less effective. 2) The use of the expenditure of the budget shows that the government's ability to make savings is efficient.



Keywords: budget, revenue, expenditure

ABSTRAK

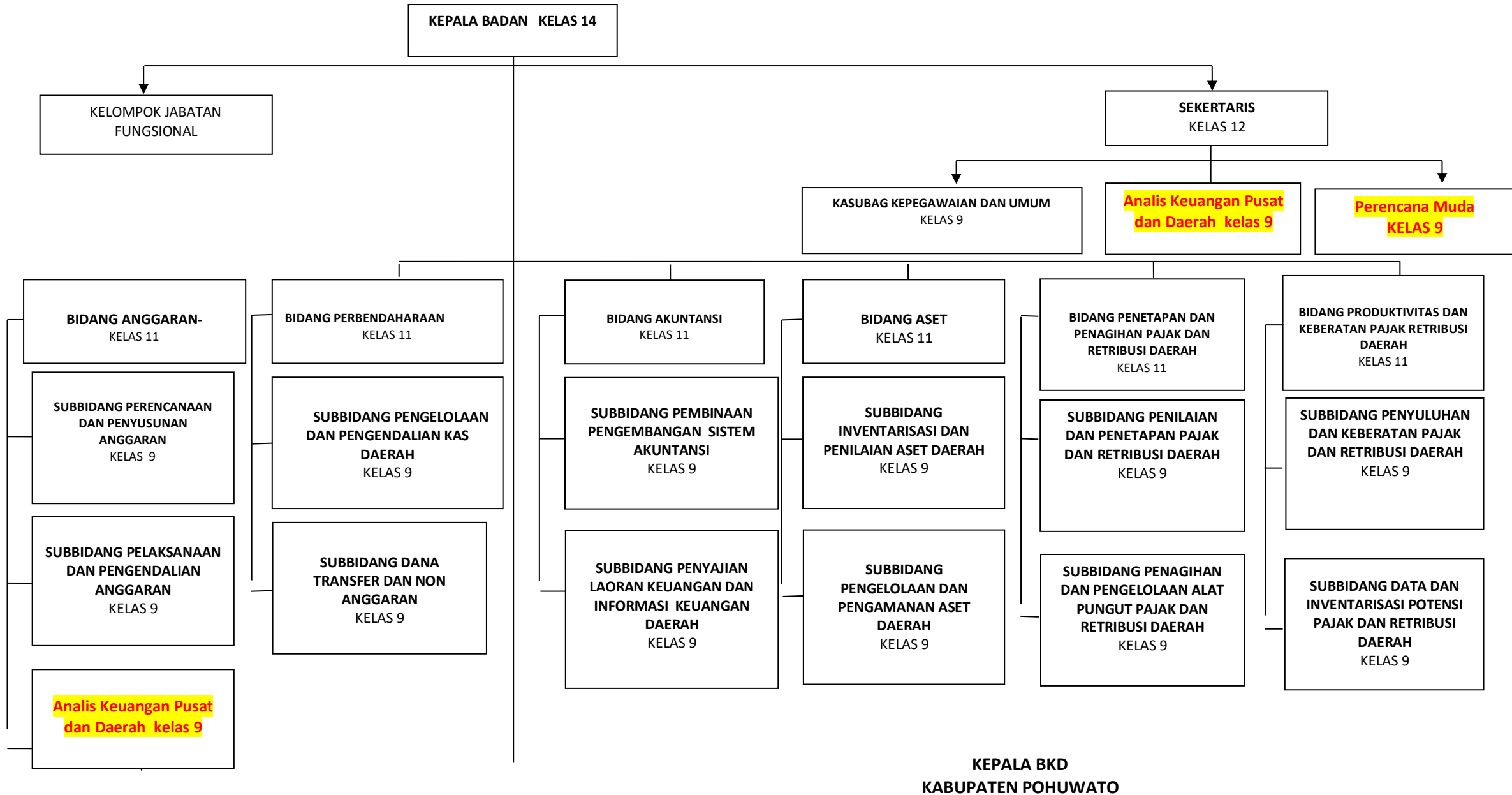
CINDRI MANGELA. E1119131. ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran pendapatan serta pembelanjaan daerah di pemerintah daerah kabupaten pohuwato sudah dilaksanakan secara ekonomis, efesien, serta efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai apakah penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sudah dilaksanakan secara ekonomis, efektifitas, dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Penggunaan Anggaran Pendapatan, dilihat dari sisi kinerja pendapatan dinilai kurang baik, kontribusi pendapatan asli daerah tidak mampu menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terhadap transfer pemerintah pusat masihs angkat tinggi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang efektif. 2. Penggunaan Anggaran Belanja menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan penghematan sudah efesien.

Kata kunci: anggaran, pendapatan, belanja



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO



KEPALA BKD
KABUPATEN POHUWATO

FITRIYANI H. LASANTU, ST., MM

NIP. 19701202 200012 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2018

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	924.940.297.080,40	0,00	904.691.929.792,04	904.691.929.792,04	(20.248.367.288,36)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	60.636.332.336,00	0,00	52.151.698.921,04	52.151.698.921,04	(8.484.633.414,96)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	9.291.490.833,00	0,00	8.880.247.117,00	8.880.247.117,00	(411.243.716,00)
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA Pajak	225.000.000,00	0,00	58.788.700,00	58.788.700,00	(166.211.300,00)
4.1.1.07	Restoran - LRAPajak	1.385.000.000,00	0,00	1.859.904.868,00	1.859.904.868,00	474.904.868,00
4.1.1.08	Hiburan - LRA Pajak	20.000.000,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	(11.100.000,00)
4.1.1.09	Reklame - LRA	265.000.000,00	0,00	200.738.760,00	200.738.760,00	(64.261.240,00)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRAPajak Air	3.500.000.000,00	0,00	4.408.760.798,00	4.408.760.798,00	908.760.798,00
4.1.1.12	Tanah - LRA	15.000.000,00	0,00	7.138.080,00	7.138.080,00	(7.861.920,00)
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	2.425.000.000,00	0,00	1.291.175.171,00	1.291.175.171,00	(1.133.824.829,00)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA Bea	881.490.833,00	0,00	756.361.297,00	756.361.297,00	(125.129.536,00)
4.1.1.16	Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	575.000.000,00	0,00	288.479.443,00	288.479.443,00	(286.520.557,00)
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8.219.670.000,00	0,00	5.322.895.756,00	5.322.895.756,00	(2.896.774.244,00)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	1.270.600.000,00	0,00	1.088.008.000,00	1.088.008.000,00	(182.592.000,00)
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	320.000.000,00	0,00	276.825.000,00	276.825.000,00	(43.175.000,00)
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	550.000.000,00	0,00	505.089.000,00	505.089.000,00	(44.911.000,00)
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA Retribusi	200.000.000,00	0,00	64.680.900,00	64.680.900,00	(135.319.100,00)
4.1.2.14	Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRARetribusi	100.110.000,00	0,00	100.269.365,00	100.269.365,00	159.365,00
4.1.2.15	Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA Retribusi Pasar Grosir	1.700.000.000,00	0,00	583.495.000,00	583.495.000,00	(1.116.505.000,00)
4.1.2.16	dan/ atau Pertokoan - LRA Retribusi Tempat Pelelangan -	153.960.000,00	0,00	138.300.000,00	138.300.000,00	(15.660.000,00)
4.1.2.17	LRA	980.000.000,00	0,00	903.819.650,00	903.819.650,00	(76.180.350,00)
4.1.2.18	Retribusi Terminal - LRA	100.000.000,00	0,00	86.300.000,00	86.300.000,00	(13.700.000,00)
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA Retribusi	40.000.000,00	0,00	23.440.000,00	23.440.000,00	(16.560.000,00)
4.1.2.23	Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	100.000.000,00	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	(23.000.000,00)
4.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	1.600.000.000,00	0,00	934.740.000,00	934.740.000,00	(665.260.000,00)
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA Retribusi	550.000.000,00	0,00	462.913.841,00	462.913.841,00	(87.086.159,00)
4.1.2.29	Izin Trayek - LRA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
4.1.2.30	Retribusi Izin Perikanan - LRA	500.000.000,00	0,00	28.015.000,00	28.015.000,00	(471.985.000,00)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.095.980.220,00	0,00	3.095.980.220,00	3.095.980.220,00	0,00
4.1.3.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	3.095.980.220,00	0,00	3.095.980.220,00	3.095.980.220,00	0,00
	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	40.029.191.283,00	0,00	34.852.575.828,04	34.852.575.828,04	(5.176.615.454,96)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH						Halaman 1 dari 7

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.000.000.000,00	0,00	1.050.885.760,29	1.050.885.760,29	50.885.760,29
4 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LRA	2.800.000.000,00	0,00	2.096.830.994,35	2.096.830.994,35	(703.169.005,65)
4 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	600.000.000,00	0,00	922.624.058,00	922.624.058,00	322.624.058,00
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	500.000.000,00	0,00	487.451.964,00	487.451.964,00	(12.548.036,00)
	Pendapatan Denda Pajak - LRA					
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0,00	0,00	12.673.268,00	12.673.268,00	12.673.268,00
4 . 1 . 4 . 09	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4 . 1 . 4 . 13	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	0,00	0,00	8.800.212,00	8.800.212,00	8.800.212,00
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD - LRA	500.000.000,00	0,00	61.050.000,00	61.050.000,00	(438.950.000,00)
4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	26.089.645.411,00	0,00	22.609.155.078,00	22.609.155.078,00	(3.480.490.333,00)
4 . 1 . 4 . 19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	0,00	0,00	263.819.810,40	263.819.810,40	263.819.810,40
4 . 1 . 4 . 23		8.539.545.872,00	0,00	7.339.164.683,00	7.339.164.683,00	(1.200.381.189,00)
	PENDAPATAN TRANSFER - LRA					
4 . 2		839.032.271.000,00	0,00	828.345.870.871,00	828.345.870.871,00	(10.686.400.129,00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA					
4 . 2 . 1		711.185.232.000,00	0,00	702.676.142.423,00	702.676.142.423,00	(8.509.089.577,00)
	Bagi Hasil Pajak - LRA					
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRADana	10.389.302.000,00	0,00	9.212.021.992,00	9.212.021.992,00	(1.177.280.008,00)
4 . 2 . 1 . 02	Alokasi Umum (DAU) - LRA	2.658.341.000,00	0,00	1.715.590.579,00	1.715.590.579,00	(942.750.421,00)
4 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	513.389.155.000,00	0,00	513.389.155.000,00	513.389.155.000,00	0,00
4 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan - LRADana	46.201.272.000,00	0,00	43.385.293.362,00	43.385.293.362,00	(2.815.978.638,00)
4 . 2 . 1 . 05	Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi - LRA Dana Alokasi	49.027.000.000,00	0,00	50.040.434.100,00	50.040.434.100,00	1.013.434.100,00
4 . 2 . 1 . 06	Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	28.830.000.000,00	0,00	27.961.587.444,00	27.961.587.444,00	(868.412.556,00)
4 . 2 . 1 . 07		60.690.162.000,00	0,00	56.972.059.946,00	56.972.059.946,00	(3.718.102.054,00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA					
4 . 2 . 2		106.147.039.000,00	0,00	106.073.314.000,00	106.073.314.000,00	(73.725.000,00)
	Dana Penyesuaian - LRA					
4 . 2 . 2 . 03		106.147.039.000,00	0,00	106.073.314.000,00	106.073.314.000,00	(73.725.000,00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA					
4 . 2 . 3		21.700.000.000,00	0,00	19.596.414.448,00	19.596.414.448,00	(2.103.585.552,00)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA					
4 . 2 . 3 . 01		21.700.000.000,00	0,00	19.596.414.448,00	19.596.414.448,00	(2.103.585.552,00)
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA					
4 . 3		25.271.693.744,40	0,00	24.194.360.000,00	24.194.360.000,00	(1.077.333.744,40)
	Pendapatan Hibah - LRA					
4 . 3 . 1		25.271.693.744,40	0,00	24.194.360.000,00	24.194.360.000,00	(1.077.333.744,40)
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRAPendapatan					
4 . 3 . 1 . 01	Hibah Dana BOS - LRA	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4 . 3 . 1 . 06		19.271.693.744,40	0,00	18.194.360.000,00	18.194.360.000,00	(1.077.333.744,40)
	BELANJA					
5		808.702.870.684,84	0,00	758.514.064.354,45	758.514.064.354,45	(50.188.806.330,39)
	BELANJA OPERASI					
5 . 1		625.329.568.629,92	0,00	589.518.318.632,45	589.518.318.632,45	(35.811.249.997,47)
	Belanja Pegawai					
5 . 1 . 1		317.143.155.941,38	0,00	308.211.847.559,00	308.211.847.559,00	(8.931.308.382,38)
	Belanja Gaji dan Tunjangan					
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	245.487.901.987,38	0,00	239.183.244.013,00	239.183.244.013,00	(6.304.657.974,38)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	50.103.739.412,00	0,00	48.400.997.815,00	48.400.997.815,00	(1.702.741.597,00)
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	3.550.000.000,00	0,00	3.531.637.920,00	3.531.637.920,00	(18.362.080,00)
5 . 1 . 1 . 04		614.574.542,00	0,00	552.614.031,00	552.614.031,00	(61.960.511,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak DaerahBelanja	398.733.500,00	0,00	77.095.726,00	77.095.726,00	(321.637.774,00)
5 . 1 . 1 . 11	Honorarium Non PNS	14.727.000.000,00	0,00	14.465.447.554,00	14.465.447.554,00	(261.552.446,00)
5 . 1 . 1 . 14	Belanja Pegawai Dana BOS	2.261.206.500,00	0,00	2.000.810.500,00	2.000.810.500,00	(260.396.000,00)
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	282.550.797.688,54	0,00	256.420.301.073,45	256.420.301.073,45	(26.130.496.615,09)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.328.878.948,60	0,00	10.226.025.428,00	10.226.025.428,00	(2.102.853.520,60)
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.086.591.650,00	0,00	20.867.317.203,50	20.867.317.203,50	(1.219.274.446,50)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor Belanja	10.323.811.042,00	0,00	9.173.512.985,00	9.173.512.985,00	(1.150.298.057,00)
5 . 1 . 2 . 04	Premi Asuransi	9.223.060.000,00	0,00	8.549.744.000,00	8.549.744.000,00	(673.316.000,00)
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan BermotorBelanja	7.777.197.550,00	0,00	7.277.889.799,00	7.277.889.799,00	(499.307.751,00)
5 . 1 . 2 . 06	Cetak dan Penggandaan	6.794.299.756,00	0,00	6.211.034.558,00	6.211.034.558,00	(583.265.198,00)
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	829.321.000,00	0,00	562.483.000,00	562.483.000,00	(266.838.000,00)
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	809.470.000,00	0,00	603.657.868,00	603.657.868,00	(205.812.132,00)
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan KantorBelanja	1.126.498.500,00	0,00	1.116.532.500,00	1.116.532.500,00	(9.966.000,00)
5 . 1 . 2 . 11	Makanan dan Minuman	20.193.924.056,00	0,00	18.531.599.351,00	18.531.599.351,00	(1.662.324.705,00)
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	786.446.000,00	0,00	766.447.000,00	766.447.000,00	(19.999.000,00)
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.381.540.000,00	0,00	1.337.595.100,00	1.337.595.100,00	(43.944.900,00)
5 . 1 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari TertentuBelanja	337.850.000,00	0,00	328.695.000,00	328.695.000,00	(9.155.000,00)
5 . 1 . 2 . 15	Perjalanan Dinas	51.003.477.255,00	0,00	49.759.073.753,00	49.759.073.753,00	(1.244.403.502,00)
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	4.514.080.100,00	0,00	4.168.353.531,00	4.168.353.531,00	(345.726.569,00)
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	3.726.739.000,00	0,00	3.168.475.000,00	3.168.475.000,00	(558.264.000,00)
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.889.773.704,00	0,00	31.105.201.478,00	31.105.201.478,00	(784.572.226,00)
5 . 1 . 2 . 21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja	1.202.450.700,00	0,00	1.020.195.700,00	1.020.195.700,00	(182.255.000,00)
5 . 1 . 2 . 22	Beasiswa Pendidikan PNS	442.500.000,00	0,00	442.500.000,00	442.500.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja	1.836.750.000,00	0,00	1.403.908.417,00	1.403.908.417,00	(432.841.583,00)
5 . 1 . 2 . 27	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Barang	4.267.900.000,00	0,00	4.030.832.000,00	4.030.832.000,00	(237.068.000,00)
5 . 1 . 2 . 29	Dana BOS	9.910.039.447,40	0,00	9.208.508.575,80	9.208.508.575,80	(701.530.871,60)
5 . 1 . 2 . 30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan KesehatanNasional	7.851.806.698,00	0,00	5.932.475.499,00	5.932.475.499,00	(1.919.331.199,00)
5 . 1 . 2 . 31	Belanja Insentif	41.737.841.000,00	0,00	39.524.446.250,00	39.524.446.250,00	(2.213.394.750,00)
5 . 1 . 2 . 32	Belanja Iuran	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 34	Belanja Jasa Kesehatan	13.501.379.148,54	0,00	9.731.239.481,15	9.731.239.481,15	(3.770.139.667,39)
5 . 1 . 2 . 35	Belanja Tansportasi dan Akomodasi	16.632.172.133,00	0,00	11.337.557.596,00	11.337.557.596,00	(5.294.614.537,00)
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	17.063.565.000,00	0,00	16.782.600.000,00	16.782.600.000,00	(280.965.000,00)
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Hibah kepada Organisasi KemasyarakatanBelanja	11.830.000.000,00	0,00	11.550.000.000,00	11.550.000.000,00	(280.000.000,00)
5 . 1 . 5 . 08	Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	5.233.565.000,00	0,00	5.232.600.000,00	5.232.600.000,00	(965.000,00)
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	8.572.050.000,00	0,00	8.103.570.000,00	8.103.570.000,00	(468.480.000,00)
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	8.572.050.000,00	0,00	8.103.570.000,00	8.103.570.000,00	(468.480.000,00)
5 . 2	BELANJA MODAL	182.523.302.054,92	0,00	168.925.745.722,00	168.925.745.722,00	(13.597.556.332,92)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	6.618.250.000,00	0,00	2.027.268.830,00	2.027.268.830,00	(4.590.981.170,00)
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	6.358.250.000,00	0,00	1.785.168.830,00	1.785.168.830,00	(4.573.081.170,00)
5 . 2 . 1 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	260.000.000,00	0,00	242.100.000,00	242.100.000,00	(17.900.000,00)
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.122.103.254,00	0,00	32.022.337.174,00	32.022.337.174,00	(2.099.766.080,00)
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	350.000.000,00	0,00	268.340.000,00	268.340.000,00	(81.660.000,00)
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	66.550.000,00	0,00	66.473.500,00	66.473.500,00	(76.500,00)
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.029.300.000,00	0,00	4.884.273.529,00	4.884.273.529,00	(145.026.471,00)
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	44.000.000,00	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	(500.000,00)
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	50.076.000,00	0,00	49.776.000,00	49.776.000,00	(300.000,00)
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	468.236.000,00	0,00	414.031.863,00	414.031.863,00	(54.204.137,00)
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.492.382.000,00	0,00	1.955.022.489,00	1.955.022.489,00	(537.359.511,00)
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.492.781.000,00	0,00	1.345.501.350,00	1.345.501.350,00	(147.279.650,00)
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.702.832.198,00	0,00	5.386.998.908,00	5.386.998.908,00	(315.833.290,00)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.531.215.756,00	0,00	5.006.823.209,00	5.006.823.209,00	(524.392.547,00)
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	663.878.000,00	0,00	656.805.000,00	656.805.000,00	(7.073.000,00)
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	468.674.000,00	0,00	428.204.823,00	428.204.823,00	(40.469.177,00)
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	350.400.000,00	0,00	333.765.313,00	333.765.313,00	(16.634.687,00)
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	128.500.000,00	0,00	113.997.000,00	113.997.000,00	(14.503.000,00)
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	10.666.865.300,00	0,00	10.585.083.440,00	10.585.083.440,00	(81.781.860,00)
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	52.298.000,00	0,00	52.298.000,00	52.298.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	336.115.000,00	0,00	226.181.750,00	226.181.750,00	(109.933.250,00)
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	56.000.000,00	0,00	55.986.000,00	55.986.000,00	(14.000,00)
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	65.000.000,00	0,00	64.825.000,00	64.825.000,00	(175.000,00)
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	101.500.000,00	0,00	78.950.000,00	78.950.000,00	(22.550.000,00)
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.471.648.644,00	0,00	35.113.132.673,00	35.113.132.673,00	(4.358.515.971,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.523.798.644,00	0,00	34.766.065.673,00	34.766.065.673,00	(1.757.732.971,00)
5 . 2 . 3 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.785.850.000,00	0,00	185.317.000,00	185.317.000,00	(2.600.533.000,00)
5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	140.000.000,00	0,00	139.850.000,00	139.850.000,00	(150.000,00)
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	22.000.000,00	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00	(100.000,00)
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.311.477.258,92	0,00	95.224.737.858,00	95.224.737.858,00	(2.086.739.400,92)
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	56.256.386.750,92	0,00	55.768.157.150,00	55.768.157.150,00	(488.229.600,92)
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	113.934.000,00	0,00	90.060.000,00	90.060.000,00	(23.874.000,00)
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.202.305.800,00	0,00	3.884.096.000,00	3.884.096.000,00	(318.209.800,00)
5 . 2 . 4 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	5.188.420.550,00	0,00	5.046.439.250,00	5.046.439.250,00	(141.981.300,00)
5 . 2 . 4 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	670.250.000,00	0,00	670.200.000,00	670.200.000,00	(50.000,00)
5 . 2 . 4 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.033.600.968,00	0,00	1.033.100.968,00	1.033.100.968,00	(500.000,00)
5 . 2 . 4 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	1.034.550.000,00	0,00	1.014.760.000,00	1.014.760.000,00	(19.790.000,00)
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	22.385.051.150,00	0,00	21.345.916.850,00	21.345.916.850,00	(1.039.134.300,00)
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	193.313.000,00	0,00	193.313.000,00	193.313.000,00	0,00
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	56.051.140,00	0,00	39.945.840,00	39.945.840,00	(16.105.300,00)
5 . 2 . 4 . 20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.696.073.900,00	0,00	1.665.638.800,00	1.665.638.800,00	(30.435.100,00)
5 . 2 . 4 . 23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	4.481.540.000,00	0,00	4.473.110.000,00	4.473.110.000,00	(8.430.000,00)
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.999.822.898,00	0,00	4.538.269.187,00	4.538.269.187,00	(461.553.711,00)
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	4.817.419.098,00	0,00	4.388.486.387,00	4.388.486.387,00	(428.932.711,00)
5 . 2 . 5 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	33.775.000,00	0,00	33.525.000,00	33.525.000,00	(250.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 5 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	16.994.300,00	0,00	11.894.300,00	11.894.300,00	(5.100.000,00)
5 . 2 . 5 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 5 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah RagaLainnya	78.753.500,00	0,00	59.363.500,00	59.363.500,00	(19.390.000,00)
5 . 2 . 5 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Belanja					
5 . 2 . 5 . 08	Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset TetapRenovasi	25.000.000,00	0,00	24.850.000,00	24.850.000,00	(150.000,00)
	BELANJA TAK TERDUGA	27.881.000,00	0,00	20.150.000,00	20.150.000,00	(7.731.000,00)
5 . 3	Belanja Tak Terduga	850.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	(780.000.000,00)
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	850.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	(780.000.000,00)
5 . 3 . 1 . 01	TRANSFER	850.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	(780.000.000,00)
6	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	145.724.537.823,00	0,00	145.498.773.487,00	145.498.773.487,00	(225.764.336,00)
6 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.751.116.083,00	0,00	1.751.116.083,00	1.751.116.083,00	0,00
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada PemerintahanKabupaten/Kota	929.149.083,00	0,00	929.149.083,00	929.149.083,00	0,00
6 . 1 . 1 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	929.149.083,00	0,00	929.149.083,00	929.149.083,00	0,00
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada PemerintahanKabupaten/Kota/Desa					
6 . 1 . 2 . 01	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	821.967.000,00	0,00	821.967.000,00	821.967.000,00	0,00
6 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	821.967.000,00	0,00	821.967.000,00	821.967.000,00	0,00
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa					
6 . 2 . 2 . 01	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	143.973.421.740,00	0,00	143.747.657.404,00	143.747.657.404,00	(225.764.336,00)
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	143.205.686.300,00	0,00	142.979.921.964,00	142.979.921.964,00	(225.764.336,00)
6 . 2 . 3 . 01	SURPLUS / DEFISIT	143.205.686.300,00	0,00	142.979.921.964,00	142.979.921.964,00	(225.764.336,00)
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	767.735.440,00	0,00	767.735.440,00	767.735.440,00	0,00
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	767.735.440,00	0,00	767.735.440,00	767.735.440,00	0,00
7 . 1 . 1 . 01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	(29.487.111.427,44)	0,00	679.091.950,59	679.091.950,59	30.166.203.378,03
7 . 1 . 1 . 02	Koreksi SiLPA	35.487.111.427,44	0,00	35.463.921.427,44	35.463.921.427,44	(23.190.000,00)
7 . 1 . 2	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	35.487.111.427,44	0,00	35.462.471.427,44	35.462.471.427,44	(24.640.000,00)
7 . 1 . 3	Penarikan Dana Bergulir	35.487.111.427,44	0,00	35.487.111.427,44	35.487.111.427,44	0,00
7 . 1 . 4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	(24.640.000,00)	(24.640.000,00)	(24.640.000,00)
7 . 1 . 5	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7 . 1 . 6	Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
7 . 2	PEMBIAYAAN NETTO	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
7 . 2 . 1		6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
7 . 2 . 2		6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
7 . 2 . 3		29.487.111.427,44	0,00	29.463.921.427,44	29.463.921.427,44	(23.190.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	30.143.013.378,03	30.143.013.378,03	30.143.013.378,03



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	996.284.671.188,00	0,00	970.534.277.246,48	970.534.277.246,48	(25.750.393.941,52)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	66.564.152.234,00	0,00	62.337.943.760,48	62.337.943.760,48	(4.226.208.473,52)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	10.977.490.833,00	0,00	9.648.779.242,00	9.648.779.242,00	(1.328.711.591,00)
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA Pajak	275.000.000,00	0,00	111.092.660,00	111.092.660,00	(163.907.340,00)
4.1.1.07	Restoran - LRAPajak	1.962.250.000,00	0,00	2.390.193.414,00	2.390.193.414,00	427.943.414,00
4.1.1.08	Hiburan - LRA Pajak	20.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	(18.500.000,00)
4.1.1.09	Reklame - LRA	315.000.000,00	0,00	279.739.590,00	279.739.590,00	(35.260.410,00)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRAPajak Air	4.408.760.798,00	0,00	4.323.054.855,00	4.323.054.855,00	(85.705.943,00)
4.1.1.12	Tanah - LRA	15.000.000,00	0,00	7.345.621,00	7.345.621,00	(7.654.379,00)
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	2.525.000.000,00	0,00	1.313.452.993,00	1.313.452.993,00	(1.211.547.007,00)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA Bea	881.480.035,00	0,00	947.777.205,00	947.777.205,00	66.297.170,00
4.1.1.16	Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	575.000.000,00	0,00	274.622.904,00	274.622.904,00	(300.377.096,00)
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9.142.603.200,00	0,00	5.593.069.349,00	5.593.069.349,00	(3.549.533.851,00)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	2.175.733.200,00	0,00	2.190.504.500,00	2.190.504.500,00	14.771.300,00
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	200.000.000,00	0,00	293.900.000,00	293.900.000,00	93.900.000,00
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	587.800.000,00	0,00	322.472.000,00	322.472.000,00	(265.328.000,00)
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA Retribusi	100.000.000,00	0,00	65.988.500,00	65.988.500,00	(34.011.500,00)
4.1.2.14	Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRARetribusi	100.110.000,00	0,00	72.953.935,00	72.953.935,00	(27.156.065,00)
4.1.2.15	Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA Retribusi Pasar Grosir	1.700.000.000,00	0,00	496.035.000,00	496.035.000,00	(1.203.965.000,00)
4.1.2.16	dan/ atau Pertokoan - LRA Retribusi Tempat Pelelangan -	153.960.000,00	0,00	130.360.000,00	130.360.000,00	(23.600.000,00)
4.1.2.17	LRA	1.000.000.000,00	0,00	739.196.450,00	739.196.450,00	(260.803.550,00)
4.1.2.18	Retribusi Terminal - LRA	175.000.000,00	0,00	102.100.000,00	102.100.000,00	(72.900.000,00)
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA Retribusi	50.000.000,00	0,00	25.790.000,00	25.790.000,00	(24.210.000,00)
4.1.2.23	Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	100.000.000,00	0,00	64.035.000,00	64.035.000,00	(35.965.000,00)
4.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	1.600.000.000,00	0,00	707.770.000,00	707.770.000,00	(892.230.000,00)
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA Retribusi	600.000.000,00	0,00	291.798.964,00	291.798.964,00	(308.201.036,00)
4.1.2.30	Izin Perikanan - LRA	550.000.000,00	0,00	40.165.000,00	40.165.000,00	(509.835.000,00)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.685.000.000,00	0,00	3.685.307.703,00	3.685.307.703,00	307.703,00
4.1.3.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	3.685.000.000,00	0,00	3.685.307.703,00	3.685.307.703,00	307.703,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	42.759.058.201,00	0,00	43.410.787.466,48	43.410.787.466,48	651.729.265,48

4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	35.223.489,00	35.223.489,00	35.223.489,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH						Halaman 1 dari 6

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	0,00	0,00	93.399.000,00	93.399.000,00	93.399.000,00
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LRA Pendapatan	1.100.000.000,00	0,00	857.558.170,32	857.558.170,32	(242.441.829,68)
4 . 1 . 4 . 04	Bunga - LRA	3.000.000.000,00	0,00	1.782.328.627,16	1.782.328.627,16	(1.217.671.372,84)
4 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	600.000.000,00	0,00	1.945.924.894,00	1.945.924.894,00	1.345.924.894,00
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	0,00	678.016.594,00	678.016.594,00	678.016.594,00
	Pendapatan Denda Pajak - LRA					
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	7.284.990,00	7.284.990,00	7.284.990,00
4 . 1 . 4 . 13	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	0,00	0,00	15.009.698,00	15.009.698,00	15.009.698,00
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD - LRA	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)
4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	28.916.000.000,00	0,00	30.233.789.595,00	30.233.789.595,00	1.317.789.595,00
4 . 1 . 4 . 19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	0,00	0,00	307.204.250,00	307.204.250,00	307.204.250,00
4 . 1 . 4 . 23		8.643.058.201,00	0,00	7.455.048.159,00	7.455.048.159,00	(1.188.010.042,00)
	PENDAPATAN TRANSFER - LRA					
4 . 2		902.601.434.104,00	0,00	880.890.770.953,00	880.890.770.953,00	(21.710.663.151,00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA					
4 . 2 . 1		758.384.805.900,00	0,00	740.354.936.381,00	740.354.936.381,00	(18.029.869.519,00)
	Bagi Hasil Pajak - LRA					
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRADana	10.086.823.900,00	0,00	6.817.818.500,00	6.817.818.500,00	(3.269.005.400,00)
4 . 2 . 1 . 02	Alokasi Umum (DAU) - LRA	2.176.064.000,00	0,00	1.376.932.105,00	1.376.932.105,00	(799.131.895,00)
4 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	529.422.948.000,00	0,00	529.422.948.000,00	529.422.948.000,00	0,00
4 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan - LRADana	84.703.266.000,00	0,00	80.297.640.386,00	80.297.640.386,00	(4.405.625.614,00)
4 . 2 . 1 . 05	Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi - LRA Dana Alokasi	24.468.307.000,00	0,00	23.978.463.479,00	23.978.463.479,00	(489.843.521,00)
4 . 2 . 1 . 06	Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	39.238.567.000,00	0,00	38.588.134.213,00	38.588.134.213,00	(650.432.787,00)
4 . 2 . 1 . 07		68.288.830.000,00	0,00	59.872.999.698,00	59.872.999.698,00	(8.415.830.302,00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA					
4 . 2 . 2		120.987.917.000,00	0,00	120.987.917.000,00	120.987.917.000,00	0,00
	Dana Penyesuaian - LRA					
4 . 2 . 2 . 03		120.987.917.000,00	0,00	120.987.917.000,00	120.987.917.000,00	0,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA					
4 . 2 . 3		23.228.711.204,00	0,00	19.547.917.572,00	19.547.917.572,00	(3.680.793.632,00)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA					
4 . 2 . 3 . 01		23.228.711.204,00	0,00	19.547.917.572,00	19.547.917.572,00	(3.680.793.632,00)
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA					
4 . 3		27.119.084.850,00	0,00	27.305.562.533,00	27.305.562.533,00	186.477.683,00
	Pendapatan Hibah - LRA					
4 . 3 . 1		27.119.084.850,00	0,00	27.305.562.533,00	27.305.562.533,00	186.477.683,00
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRAPendapatan					
4 . 3 . 1 . 01	Hibah Dana BOS - LRA	8.945.914.000,00	0,00	6.810.922.533,00	6.810.922.533,00	(2.134.991.467,00)
4 . 3 . 1 . 06		18.173.170.850,00	0,00	20.494.640.000,00	20.494.640.000,00	2.321.469.150,00
	BELANJA					
5		865.037.328.039,00	0,00	827.465.026.349,56	827.465.026.349,56	(37.572.301.689,44)
	BELANJA OPERASI					
5 . 1		665.480.989.757,00	0,00	638.160.941.589,19	638.160.941.589,19	(27.320.048.167,81)
	Belanja Pegawai					
5 . 1 . 1		335.740.398.607,00	0,00	331.052.664.590,00	331.052.664.590,00	(4.687.734.017,00)
	Belanja Gaji dan Tunjangan					
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	221.199.860.174,00	0,00	219.935.191.733,00	219.935.191.733,00	(1.264.668.441,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	91.983.945.917,00	0,00	89.831.476.397,00	89.831.476.397,00	(2.152.469.520,00)
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	3.601.248.516,00	0,00	3.601.248.516,00	3.601.248.516,00	0,00
5 . 1 . 1 . 04		689.016.500,00	0,00	358.218.074,00	358.218.074,00	(330.798.426,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak DaerahBelanja	410.983.500,00	0,00	45.125.370,00	45.125.370,00	(365.858.130,00)
5 . 1 . 1 . 11	Honorarium Non PNS	15.626.550.000,00	0,00	15.135.558.000,00	15.135.558.000,00	(490.992.000,00)
5 . 1 . 1 . 13	Honorarium Pengelola Dana BOKBelanja	271.500.000,00	0,00	231.000.000,00	231.000.000,00	(40.500.000,00)
5 . 1 . 1 . 14	Pegawai Dana BOS	1.957.294.000,00	0,00	1.914.846.500,00	1.914.846.500,00	(42.447.500,00)
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	301.828.521.150,00	0,00	279.675.756.999,19	279.675.756.999,19	(22.152.764.150,81)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.836.756.172,00	0,00	15.349.111.929,92	15.349.111.929,92	(1.487.644.242,08)
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.531.612.956,00	0,00	15.523.204.226,27	15.523.204.226,27	(1.008.408.729,73)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor Belanja	56.137.323.854,00	0,00	52.167.962.188,00	52.167.962.188,00	(3.969.361.666,00)
5 . 1 . 2 . 04	Premi Asuransi	8.006.610.000,00	0,00	7.892.984.885,00	7.892.984.885,00	(113.625.115,00)
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan BermotorBelanja	6.575.533.032,00	0,00	5.641.383.980,00	5.641.383.980,00	(934.149.052,00)
5 . 1 . 2 . 06	Cetak dan Penggandaan	7.194.917.363,00	0,00	6.494.884.743,00	6.494.884.743,00	(700.032.620,00)
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.161.848.000,00	0,00	856.655.000,00	856.655.000,00	(305.193.000,00)
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	259.869.000,00	0,00	209.954.964,00	209.954.964,00	(49.914.036,00)
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.032.180.000,00	0,00	968.930.000,00	968.930.000,00	(63.250.000,00)
5 . 1 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.646.268.492,00	0,00	21.078.367.753,00	21.078.367.753,00	(2.567.900.739,00)
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	840.375.000,00	0,00	837.178.000,00	837.178.000,00	(3.197.000,00)
5 . 1 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	529.940.000,00	0,00	484.250.760,00	484.250.760,00	(45.689.240,00)
5 . 1 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari TertentuBelanja	408.250.000,00	0,00	366.784.325,00	366.784.325,00	(41.465.675,00)
5 . 1 . 2 . 15	Perjalanan Dinas	62.066.936.762,00	0,00	59.840.023.529,00	59.840.023.529,00	(2.226.913.233,00)
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	5.227.041.431,00	0,00	4.339.981.035,00	4.339.981.035,00	(887.060.396,00)
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	2.214.997.500,00	0,00	2.091.747.500,00	2.091.747.500,00	(123.250.000,00)
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	32.874.667.294,00	0,00	32.091.691.835,00	32.091.691.835,00	(782.975.459,00)
5 . 1 . 2 . 21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja	330.851.500,00	0,00	270.970.000,00	270.970.000,00	(59.881.500,00)
5 . 1 . 2 . 22	Beasiswa Pendidikan PNS	423.500.000,00	0,00	417.500.000,00	417.500.000,00	(6.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja	1.923.110.000,00	0,00	1.799.986.837,00	1.799.986.837,00	(123.123.163,00)
5 . 1 . 2 . 27	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Barang	4.780.935.400,00	0,00	4.465.952.000,00	4.465.952.000,00	(314.983.400,00)
5 . 1 . 2 . 29	Dana BOS	11.677.476.752,00	0,00	10.984.039.480,00	10.984.039.480,00	(693.437.272,00)
5 . 1 . 2 . 30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan KesehatanNasional	8.766.735.082,00	0,00	6.723.712.662,00	6.723.712.662,00	(2.043.022.420,00)
5 . 1 . 2 . 32	Belanja Iuran	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 34	Belanja Jasa Kesehatan	14.447.410.620,00	0,00	14.141.894.185,00	14.141.894.185,00	(305.516.435,00)
5 . 1 . 2 . 35	Belanja Tansportasi dan Akomodasi	17.923.374.940,00	0,00	14.626.605.182,00	14.626.605.182,00	(3.296.769.758,00)
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	20.564.970.000,00	0,00	20.223.970.000,00	20.223.970.000,00	(341.000.000,00)
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	1.185.000.000,00	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	(35.000.000,00)
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	13.682.170.000,00	0,00	13.382.170.000,00	13.382.170.000,00	(300.000.000,00)
5 . 1 . 5 . 08	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta Belanja	4.670.400.000,00	0,00	4.664.400.000,00	4.664.400.000,00	(6.000.000,00)
5 . 1 . 5 . 09	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	1.027.400.000,00	0,00	1.027.400.000,00	1.027.400.000,00	0,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	7.347.100.000,00	0,00	7.208.550.000,00	7.208.550.000,00	(138.550.000,00)
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	7.347.100.000,00	0,00	7.208.550.000,00	7.208.550.000,00	(138.550.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2	BELANJA MODAL	199.116.338.282,00	0,00	188.879.484.760,37	188.879.484.760,37	(10.236.853.521,63)
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	2.505.000.000,00	0,00	1.603.690.719,00	1.603.690.719,00	(901.309.281,00)
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.505.000.000,00	0,00	1.603.690.719,00	1.603.690.719,00	(901.309.281,00)
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.510.133.446,00	0,00	52.702.519.930,00	52.702.519.930,00	(3.807.613.516,00)
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.081.751.888,00	0,00	4.321.630.477,00	4.321.630.477,00	(2.760.121.411,00)
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	1.115.000.000,00	0,00	1.086.932.000,00	1.086.932.000,00	(28.068.000,00)
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	170.000.000,00	0,00	169.500.000,00	169.500.000,00	(500.000,00)
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	783.200.000,00	0,00	546.160.500,00	546.160.500,00	(237.039.500,00)
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	85.500.000,00	0,00	85.450.000,00	85.450.000,00	(50.000,00)
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	196.200.000,00	0,00	173.277.000,00	173.277.000,00	(22.923.000,00)
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.915.623.563,00	0,00	3.266.215.612,00	3.266.215.612,00	350.592.049,00
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.019.601.368,00	0,00	4.583.640.644,00	4.583.640.644,00	(435.960.724,00)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.375.389.485,00	0,00	6.630.055.931,00	6.630.055.931,00	254.666.446,00
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	496.967.500,00	0,00	493.502.500,00	493.502.500,00	(3.465.000,00)
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	384.228.000,00	0,00	518.622.800,00	518.622.800,00	134.394.800,00
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	105.000.000,00	0,00	104.700.000,00	104.700.000,00	(300.000,00)
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	9.570.000,00	0,00	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	604.762.000,00	0,00	487.936.000,00	487.936.000,00	(116.826.000,00)
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	30.437.695.642,00	0,00	29.527.559.529,00	29.527.559.529,00	(910.136.113,00)
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	4.720.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	(120.000,00)
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	502.900.000,00	0,00	472.629.937,00	472.629.937,00	(30.270.063,00)
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2.300.000,00	0,00	2.212.500,00	2.212.500,00	(87.500,00)
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	120.000.000,00	0,00	118.800.000,00	118.800.000,00	(1.200.000,00)
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	20.000.000,00	0,00	19.917.500,00	19.917.500,00	(82.500,00)
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	79.724.000,00	0,00	79.607.000,00	79.607.000,00	(117.000,00)
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.079.210.741,00	0,00	60.536.085.286,69	60.536.085.286,69	(3.543.125.454,31)
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	64.039.210.741,00	0,00	60.496.335.286,69	60.496.335.286,69	(3.542.875.454,31)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40.000.000,00	0,00	39.750.000,00	39.750.000,00	(250.000,00)
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.613.409.293,00	0,00	67.994.886.786,68	67.994.886.786,68	(1.618.522.506,32)
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	42.342.895.496,00	0,00	42.118.987.321,67	42.118.987.321,67	(223.908.174,33)
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	4.671.882.000,00	0,00	4.204.086.086,47	4.204.086.086,47	(467.795.913,53)
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.796.382.000,00	0,00	3.554.085.779,00	3.554.085.779,00	(242.296.221,00)
5 . 2 . 4 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	4.998.931.902,00	0,00	4.801.199.867,54	4.801.199.867,54	(197.732.034,46)
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	460.280.000,00	0,00	460.007.485,00	460.007.485,00	(272.515,00)
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	160.500.000,00	0,00	160.460.000,00	160.460.000,00	(40.000,00)
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	21.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	(5.000.000,00)
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	9.355.810.750,00	0,00	9.094.498.885,00	9.094.498.885,00	(261.311.865,00)
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	115.000.000,00	0,00	84.900.000,00	84.900.000,00	(30.100.000,00)
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	216.105.300,00	0,00	199.809.970,00	199.809.970,00	(16.295.330,00)
5 . 2 . 4 . 20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	300.621.845,00	0,00	283.723.845,00	283.723.845,00	(16.898.000,00)
5 . 2 . 4 . 23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	3.172.000.000,00	0,00	3.015.127.547,00	3.015.127.547,00	(156.872.453,00)
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.408.584.802,00	0,00	6.042.302.038,00	6.042.302.038,00	(366.282.764,00)
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	6.331.574.802,00	0,00	5.968.064.888,00	5.968.064.888,00	(363.509.914,00)
5 . 2 . 5 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	67.010.000,00	0,00	64.237.150,00	64.237.150,00	(2.772.850,00)
5 . 2 . 5 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	440.000.000,00	0,00	424.600.000,00	424.600.000,00	(15.400.000,00)
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	440.000.000,00	0,00	424.600.000,00	424.600.000,00	(15.400.000,00)
5 . 3 . 1 . 01	Belanja Tak Terduga	440.000.000,00	0,00	424.600.000,00	424.600.000,00	(15.400.000,00)
6	TRANSFER	154.387.233.080,00	0,00	153.435.034.516,00	153.435.034.516,00	(952.198.564,00)
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.012.009.403,00	0,00	2.012.009.403,00	2.012.009.403,00	0,00
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.097.749.083,00	0,00	1.097.749.083,00	1.097.749.083,00	0,00
6 . 1 . 1 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	1.097.749.083,00	0,00	1.097.749.083,00	1.097.749.083,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	914.260.320,00	0,00	914.260.320,00	914.260.320,00	0,00
6 . 1 . 2 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada PemerintahanKabupaten/Kota/Desa	914.260.320,00	0,00	914.260.320,00	914.260.320,00	0,00
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
6 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	152.375.223.677,00	0,00	151.423.025.113,00	151.423.025.113,00	(952.198.564,00)
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	151.599.339.302,00	0,00	150.647.140.742,00	150.647.140.742,00	(952.198.560,00)
6 . 2 . 2 . 01	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	151.599.339.302,00	0,00	150.647.140.742,00	150.647.140.742,00	(952.198.560,00)
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	775.884.375,00	0,00	775.884.371,00	775.884.371,00	(4,00)
6 . 2 . 3 . 01		775.884.375,00	0,00	775.884.371,00	775.884.371,00	(4,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(23.139.889.931,00)	0,00	(10.365.783.619,08)	(10.365.783.619,08)	12.774.106.311,92
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
7 . 1	Penggunaan SiLPA	30.139.889.931,00	0,00	30.143.013.378,03	30.143.013.378,03	3.123.447,03
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	30.139.889.931,00	0,00	30.143.013.378,03	30.143.013.378,03	3.123.447,03
7 . 1 . 1 . 01		30.139.889.931,00	0,00	30.143.013.378,03	30.143.013.378,03	3.123.447,03
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
7 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal pada BUMD	7.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
7 . 2 . 2 . 02		7.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTOSISA	23.139.889.931,00	0,00	23.143.013.378,03	23.143.013.378,03	3.123.447,03
	LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	12.777.229.758,95	12.777.229.758,95	12.777.229.758,95



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	989.132.017.642,40	0,00	955.946.119.926,20	955.946.119.926,20	(33.185.897.716,20)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	74.201.375.007,00	0,00	50.953.585.078,20	50.953.585.078,20	(23.247.789.928,80)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	11.143.760.798,00	0,00	8.244.259.730,00	8.244.259.730,00	(2.899.501.068,00)
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA Pajak	275.000.000,00	0,00	83.177.961,00	83.177.961,00	(191.822.039,00)
4.1.1.07	Restoran - LRA Pajak	2.000.000.000,00	0,00	1.614.339.839,00	1.614.339.839,00	(385.660.161,00)
4.1.1.08	Hiburan - LRA Pajak	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)
4.1.1.09	Reklame - LRA	315.000.000,00	0,00	259.579.558,00	259.579.558,00	(55.420.442,00)
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA Pajak Air	4.408.760.798,00	0,00	4.374.851.152,00	4.374.851.152,00	(33.909.646,00)
4.1.1.12	Tanah - LRA	25.000.000,00	0,00	15.506.766,00	15.506.766,00	(9.493.234,00)
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	2.525.000.000,00	0,00	526.402.517,00	526.402.517,00	(1.998.597.483,00)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA Bea	1.000.000.000,00	0,00	703.337.956,00	703.337.956,00	(296.662.044,00)
4.1.1.16	Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	575.000.000,00	0,00	667.063.981,00	667.063.981,00	92.063.981,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.467.727.000,00	0,00	3.974.757.033,00	3.974.757.033,00	(3.492.969.967,00)
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	2.490.596.651,00	0,00	1.671.058.251,00	1.671.058.251,00	(819.538.400,00)
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	50.000.000,00	0,00	42.205.000,00	42.205.000,00	(7.795.000,00)
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	200.000.000,00	0,00	106.650.000,00	106.650.000,00	(93.350.000,00)
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	587.800.000,00	0,00	112.830.000,00	112.830.000,00	(474.970.000,00)
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA Retribusi	100.000.000,00	0,00	193.552.000,00	193.552.000,00	93.552.000,00
4.1.2.14	Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA Retribusi	82.000.000,00	0,00	104.358.767,00	104.358.767,00	22.358.767,00
4.1.2.15	Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA Retribusi Pasar Grosir	628.370.349,00	0,00	258.650.000,00	258.650.000,00	(369.720.349,00)
4.1.2.16	dan/ atau Pertokoan - LRA Retribusi Tempat Pelelangan -	153.960.000,00	0,00	166.665.000,00	166.665.000,00	12.705.000,00
4.1.2.17	LRA	1.000.000.000,00	0,00	575.580.345,00	575.580.345,00	(424.419.655,00)
4.1.2.18	Retribusi Terminal - LRA	175.000.000,00	0,00	80.800.000,00	80.800.000,00	(94.200.000,00)
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA Retribusi	50.000.000,00	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	(29.900.000,00)
4.1.2.23	Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	100.000.000,00	0,00	47.054.000,00	47.054.000,00	(52.946.000,00)
4.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	700.000.000,00	0,00	336.590.000,00	336.590.000,00	(363.410.000,00)
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA Retribusi	600.000.000,00	0,00	233.898.670,00	233.898.670,00	(366.101.330,00)
4.1.2.30	Izin Perikanan - LRA	550.000.000,00	0,00	24.765.000,00	24.765.000,00	(525.235.000,00)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.800.000.000,00	0,00	2.200.994.050,00	2.200.994.050,00	(1.599.005.950,00)
4.1.3.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	3.800.000.000,00	0,00	2.200.994.050,00	2.200.994.050,00	(1.599.005.950,00)
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	51.789.887.209,00	0,00	36.533.574.265,20	36.533.574.265,20	(15.256.312.943,80)

4 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	0,00	0,00	75.571.499,00	75.571.499,00	75.571.499,00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH						Halaman 1 dari 6

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	2.079.828.504,00	0,00	659.498.475,80	659.498.475,80	(1.420.330.028,20)
4 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LRA	3.500.000.000,00	0,00	1.203.375.921,40	1.203.375.921,40	(2.296.624.078,60)
4 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	800.000.000,00	0,00	744.251.588,00	744.251.588,00	(55.748.412,00)
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	250.000.000,00	0,00	106.108.258,00	106.108.258,00	(143.891.742,00)
	Pendapatan Denda Pajak - LRA					
4 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	60.000.000,00	0,00	5.686.047,00	5.686.047,00	(54.313.953,00)
4 . 1 . 4 . 09	Pendapatan dari Pengembalian	50.000.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	(49.380.000,00)
4 . 1 . 4 . 13	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	500.000.000,00	0,00	43.393.665,00	43.393.665,00	(456.606.335,00)
4 . 1 . 4 . 16	Pendapatan BLUD - LRA	500.000.000,00	0,00	47.500.000,00	47.500.000,00	(452.500.000,00)
4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	36.009.620.405,00	0,00	25.653.083.952,00	25.653.083.952,00	(10.356.536.453,00)
4 . 1 . 4 . 19	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	0,00	0,00	2.425.351.058,00	2.425.351.058,00	2.425.351.058,00
4 . 1 . 4 . 23		8.040.438.300,00	0,00	5.569.133.801,00	5.569.133.801,00	(2.471.304.499,00)
	PENDAPATAN TRANSFER - LRA					
4 . 2		880.341.494.400,00	0,00	873.954.766.371,00	873.954.766.371,00	(6.386.728.029,00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA					
4 . 2 . 1		730.575.882.000,00	0,00	723.282.363.424,00	723.282.363.424,00	(7.293.518.576,00)
	Bagi Hasil Pajak - LRA					
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRADana	7.679.939.000,00	0,00	6.947.340.461,00	6.947.340.461,00	(732.598.539,00)
4 . 2 . 1 . 02	Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.993.790.000,00	0,00	1.190.623.339,00	1.190.623.339,00	(803.166.661,00)
4 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	489.117.966.000,00	0,00	487.482.122.000,00	487.482.122.000,00	(1.635.844.000,00)
4 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan - LRADana	62.626.752.000,00	0,00	61.117.763.921,00	61.117.763.921,00	(1.508.988.079,00)
4 . 2 . 1 . 05	Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi - LRA Dana Alokasi	61.985.105.000,00	0,00	61.131.125.860,00	61.131.125.860,00	(853.979.140,00)
4 . 2 . 1 . 06	Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	44.875.813.000,00	0,00	43.788.688.607,00	43.788.688.607,00	(1.087.124.393,00)
4 . 2 . 1 . 07		62.296.517.000,00	0,00	61.624.699.236,00	61.624.699.236,00	(671.817.764,00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA					
4 . 2 . 2		120.319.701.000,00	0,00	120.170.204.412,00	120.170.204.412,00	(149.496.588,00)
	Dana Penyesuaian - LRA					
4 . 2 . 2 . 03		120.319.701.000,00	0,00	120.170.204.412,00	120.170.204.412,00	(149.496.588,00)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA					
4 . 2 . 3		25.000.000.000,00	0,00	27.433.742.935,00	27.433.742.935,00	2.433.742.935,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA					
4 . 2 . 3 . 01		25.000.000.000,00	0,00	27.433.742.935,00	27.433.742.935,00	2.433.742.935,00
	Bantuan Keuangan - LRA					
4 . 2 . 4		4.445.911.400,00	0,00	3.068.455.600,00	3.068.455.600,00	(1.377.455.800,00)
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA					
4 . 2 . 4 . 01		4.445.911.400,00	0,00	3.068.455.600,00	3.068.455.600,00	(1.377.455.800,00)
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA					
4 . 3		34.589.148.235,40	0,00	31.037.768.477,00	31.037.768.477,00	(3.551.379.758,40)
	Pendapatan Hibah - LRA					
4 . 3 . 1		34.589.148.235,40	0,00	31.037.768.477,00	31.037.768.477,00	(3.551.379.758,40)
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRAPendapatan					
4 . 3 . 1 . 01	Hibah Dana BOS - LRA	8.639.228.000,00	0,00	7.038.774.977,00	7.038.774.977,00	(1.600.453.023,00)
4 . 3 . 1 . 06		25.949.920.235,40	0,00	23.998.993.500,00	23.998.993.500,00	(1.950.926.735,40)
	BELANJA					
5		855.941.060.021,35	0,00	812.324.184.587,00	812.324.184.587,00	(43.616.875.434,35)
	BELANJA OPERASI					
5 . 1		653.015.295.841,09	0,00	621.662.367.893,00	621.662.367.893,00	(31.352.927.948,09)
	Belanja Pegawai					
5 . 1 . 1		326.837.467.138,80	0,00	321.350.499.179,00	321.350.499.179,00	(5.486.967.959,80)
	Belanja Gaji dan Tunjangan					
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	258.341.606.561,00	0,00	255.132.007.831,00	255.132.007.831,00	(3.209.598.730,00)
5 . 1 . 1 . 02		60.914.174.187,80	0,00	59.614.057.278,00	59.614.057.278,00	(1.300.116.909,80)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.290.000.000,00	0,00	2.171.099.700,00	2.171.099.700,00	(118.900.300,00)
5 . 1 . 1 . 04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Belanja	557.188.040,00	0,00	262.475.770,00	262.475.770,00	(294.712.270,00)
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	373.386.350,00	0,00	7.559.100,00	7.559.100,00	(365.827.250,00)
5 . 1 . 1 . 11	Belanja Honorarium Non PNSBelanja	1.348.850.000,00	0,00	1.261.200.000,00	1.261.200.000,00	(87.650.000,00)
5 . 1 . 1 . 14	Pegawai Dana BOS	2.912.262.000,00	0,00	2.825.099.500,00	2.825.099.500,00	(87.162.500,00)
5 . 1 . 1 . 15	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	100.000.000,00	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	(23.000.000,00)
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.655.312.258,29	0,00	242.397.423.470,00	242.397.423.470,00	(23.257.888.788,29)
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.088.615.277,70	0,00	4.631.855.976,00	4.631.855.976,00	(456.759.301,70)
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.056.405.308,00	0,00	10.495.033.065,00	10.495.033.065,00	(561.372.243,00)
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor Belanja	71.941.520.415,00	0,00	67.560.156.621,00	67.560.156.621,00	(4.381.363.794,00)
5 . 1 . 2 . 04	Premi Asuransi	7.218.977.168,00	0,00	7.018.748.954,00	7.018.748.954,00	(200.228.214,00)
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan BermotorBelanja	4.155.950.510,50	0,00	3.800.139.551,00	3.800.139.551,00	(355.810.959,50)
5 . 1 . 2 . 06	Cetak dan Penggandaan	3.547.332.805,20	0,00	3.291.329.350,00	3.291.329.350,00	(256.003.455,20)
5 . 1 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	587.200.000,00	0,00	455.670.000,00	455.670.000,00	(131.530.000,00)
5 . 1 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	58.154.843,00	0,00	56.646.000,00	56.646.000,00	(1.508.843,00)
5 . 1 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan KantorBelanja	364.995.000,00	0,00	355.934.000,00	355.934.000,00	(9.061.000,00)
5 . 1 . 2 . 11	Makanan dan Minuman	12.039.571.975,00	0,00	11.019.024.956,00	11.019.024.956,00	(1.020.547.019,00)
5 . 1 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan AtributnyaBelanja	314.500.000,00	0,00	312.855.000,00	312.855.000,00	(1.645.000,00)
5 . 1 . 2 . 13	Pakaian Kerja	1.593.750.700,00	0,00	1.412.082.500,00	1.412.082.500,00	(181.668.200,00)
5 . 1 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari TertentuBelanja	142.950.000,00	0,00	142.150.000,00	142.150.000,00	(800.000,00)
5 . 1 . 2 . 15	Perjalanan Dinas	40.260.458.318,84	0,00	39.217.285.679,00	39.217.285.679,00	(1.043.172.639,84)
5 . 1 . 2 . 18	Belanja Pemeliharaan	1.639.649.850,00	0,00	1.564.435.994,00	1.564.435.994,00	(75.213.856,00)
5 . 1 . 2 . 19	Belanja Jasa Konsultansi	2.412.648.000,00	0,00	2.115.517.270,00	2.115.517.270,00	(297.130.730,00)
5 . 1 . 2 . 20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.201.627.083,00	0,00	22.044.619.949,00	22.044.619.949,00	(157.007.134,00)
5 . 1 . 2 . 21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja	199.946.875,00	0,00	199.946.875,00	199.946.875,00	0,00
5 . 1 . 2 . 22	Beasiswa Pendidikan PNS	295.000.000,00	0,00	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja	382.012.000,00	0,00	355.710.000,00	355.710.000,00	(26.302.000,00)
5 . 1 . 2 . 25	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/MasyarakatBelanja	3.310.000.000,00	0,00	3.260.818.000,00	3.260.818.000,00	(49.182.000,00)
5 . 1 . 2 . 29	Barang Dana BOS	14.473.676.023,40	0,00	14.048.743.163,00	14.048.743.163,00	(424.932.860,40)
5 . 1 . 2 . 30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	7.850.558.188,00	0,00	5.263.836.635,00	5.263.836.635,00	(2.586.721.553,00)
5 . 1 . 2 . 32	Belanja Iuran	35.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)
5 . 1 . 2 . 34	Belanja Jasa Kesehatan	4.127.332.462,00	0,00	2.846.474.471,00	2.846.474.471,00	(1.280.857.991,00)
5 . 1 . 2 . 35	Belanja Tansportasi dan Akomodasi	9.685.607.951,00	0,00	8.226.793.937,00	8.226.793.937,00	(1.458.814.014,00)
5 . 1 . 2 . 36	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.441.871.504,65	0,00	26.151.615.524,00	26.151.615.524,00	(8.290.255.980,65)
5 . 1 . 2 . 37	Uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepadaPihak Ketiga/Masyarakat	6.230.000.000,00	0,00	6.230.000.000,00	6.230.000.000,00	0,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	48.471.545.244,00	0,00	47.405.095.244,00	47.405.095.244,00	(1.066.450.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 5 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	29.255.615.000,00	0,00	29.227.315.000,00	29.227.315.000,00	(28.300.000,00)
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	12.390.380.244,00	0,00	11.610.880.244,00	11.610.880.244,00	(779.500.000,00)
5 . 1 . 5 . 08	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta Belanja	5.520.000.000,00	0,00	5.261.400.000,00	5.261.400.000,00	(258.600.000,00)
5 . 1 . 5 . 09	Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	1.305.550.000,00	0,00	1.305.500.000,00	1.305.500.000,00	(50.000,00)
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	12.050.971.200,00	0,00	10.509.350.000,00	10.509.350.000,00	(1.541.621.200,00)
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	12.050.971.200,00	0,00	10.509.350.000,00	10.509.350.000,00	(1.541.621.200,00)
5 . 2	BELANJA MODAL	186.159.904.880,26	0,00	174.904.529.862,00	174.904.529.862,00	(11.255.375.018,26)
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	2.583.000.000,00	0,00	2.565.000.000,00	2.565.000.000,00	(18.000.000,00)
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.565.000.000,00	0,00	2.565.000.000,00	2.565.000.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(18.000.000,00)
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.768.931.900,60	0,00	66.403.449.862,00	66.403.449.862,00	(4.365.482.038,60)
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat BesarDarat	436.250.000,00	0,00	428.087.000,00	428.087.000,00	(8.163.000,00)
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	221.000.000,00	0,00	218.699.000,00	218.699.000,00	(2.301.000,00)
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel	4.158.775.000,00	0,00	3.342.400.000,00	3.342.400.000,00	(816.375.000,00)
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	65.000.000,00	0,00	64.592.000,00	64.592.000,00	(408.000,00)
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(42.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	24.746.900,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	(19.746.900,00)
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah	79.723.000,00	0,00	79.723.000,00	79.723.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 13	Tangga	155.750.000,00	0,00	155.700.000,00	155.700.000,00	(50.000,00)
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.242.764.062,00	0,00	2.527.886.912,00	2.527.886.912,00	(714.877.150,00)
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi	4.823.169.029,20	0,00	4.105.924.946,00	4.105.924.946,00	(717.244.083,20)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Belanja	6.163.352.762,40	0,00	5.335.698.696,00	5.335.698.696,00	(827.654.066,40)
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KedokteranBelanja	394.700.000,00	0,00	393.256.500,00	393.256.500,00	(1.443.500,00)
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	464.704.700,00	0,00	414.864.722,00	414.864.722,00	(49.839.978,00)
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Laboratorium	10.891.052.531,00	0,00	10.761.223.213,00	10.761.223.213,00	(129.829.318,00)
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPeraga/Praktek	37.229.026.737,00	0,00	36.375.674.235,00	36.375.674.235,00	(853.352.502,00)
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 24	Senjata Api	2.272.167.179,00	0,00	2.091.175.838,00	2.091.175.838,00	(180.991.341,00)
5 . 2 . 2 . 32		75.500.000,00	0,00	74.793.800,00	74.793.800,00	(706.200,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.320.723.327,00	0,00	75.698.063.543,00	75.698.063.543,00	(4.622.659.784,00)
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.320.723.327,00	0,00	75.698.063.543,00	75.698.063.543,00	(4.622.659.784,00)
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.573.994.605,26	0,00	27.628.988.327,00	27.628.988.327,00	(1.945.006.278,26)
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	12.196.010.718,00	0,00	11.646.061.732,00	11.646.061.732,00	(549.948.986,00)
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	764.847.786,00	0,00	589.038.286,00	589.038.286,00	(175.809.500,00)
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.649.520.412,26	0,00	3.178.269.007,00	3.178.269.007,00	(471.251.405,26)
5 . 2 . 4 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	711.500.000,00	0,00	710.933.584,00	710.933.584,00	(566.416,00)
5 . 2 . 4 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	955.500.000,00	0,00	921.311.234,00	921.311.234,00	(34.188.766,00)
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	579.890.000,00	0,00	578.539.095,00	578.539.095,00	(1.350.905,00)
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	100.000.000,00	0,00	99.619.121,00	99.619.121,00	(380.879,00)
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	22.500.000,00	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	(300.000,00)
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	8.677.171.773,00	0,00	8.123.615.396,00	8.123.615.396,00	(553.556.377,00)
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	382.650.000,00	0,00	378.649.000,00	378.649.000,00	(4.001.000,00)
5 . 2 . 4 . 23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	1.534.403.916,00	0,00	1.380.751.872,00	1.380.751.872,00	(153.652.044,00)
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.913.255.047,40	0,00	2.609.028.130,00	2.609.028.130,00	(304.226.917,40)
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.909.755.047,40	0,00	2.605.528.130,00	2.605.528.130,00	(304.226.917,40)
5 . 2 . 5 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	16.765.859.300,00	0,00	15.757.286.832,00	15.757.286.832,00	(1.008.572.468,00)
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	16.765.859.300,00	0,00	15.757.286.832,00	15.757.286.832,00	(1.008.572.468,00)
5 . 3 . 1 . 01	Belanja Tak Terduga	16.765.859.300,00	0,00	15.757.286.832,00	15.757.286.832,00	(1.008.572.468,00)
6	TRANSFER	145.968.187.380,00	0,00	144.555.189.232,00	144.555.189.232,00	(1.412.998.148,00)
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1.861.148.780,00	0,00	930.574.460,00	930.574.460,00	(930.574.320,00)
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.114.376.080,00	0,00	557.188.054,00	557.188.054,00	(557.188.026,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
6 . 1 . 1 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada PemerintahanKabupaten/Kota	1.114.376.080,00	0,00	557.188.054,00	557.188.054,00	(557.188.026,00)
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada PemerintahanKabupaten/Kota/Desa	746.772.700,00	0,00	373.386.406,00	373.386.406,00	(373.386.294,00)
6 . 1 . 2 . 01	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	746.772.700,00	0,00	373.386.406,00	373.386.406,00	(373.386.294,00)
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa					
6 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	144.107.038.600,00	0,00	143.624.614.772,00	143.624.614.772,00	(482.423.828,00)
6 . 2 . 2		144.107.038.600,00	0,00	143.624.614.772,00	143.624.614.772,00	(482.423.828,00)
6 . 2 . 2 . 01	SURPLUS / DEFISIT	144.107.038.600,00	0,00	143.624.614.772,00	143.624.614.772,00	(482.423.828,00)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	(12.777.229.758,95)	0,00	(933.253.892,80)	(933.253.892,80)	11.843.975.866,15
	Penggunaan SiLPA					
7 . 1		12.777.229.758,95	0,00	12.777.229.758,95	12.777.229.758,95	0,00
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	12.777.229.758,95	0,00	12.777.229.758,95	12.777.229.758,95	0,00
7 . 1 . 1 . 01	PEMBIAYAAN NETTOSISA	12.777.229.758,95	0,00	12.777.229.758,95	12.777.229.758,95	0,00
	LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	12.777.229.758,95	0,00	12.777.229.758,95	12.777.229.758,95	0,00
		0,00	0,00	11.843.975.866,15	11.843.975.866,15	11.843.975.866,15

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

No. : 19211/PIP/LEMLIT-UNISAN/III/2022
Jenis : Permohonan Izin Penelitian

Kepada YTH.
Kepala Kesbangpol Kab. Pohuwato

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Cindri Mangela

NIM : E1119131

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

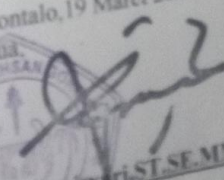
Lokasi Penelitian : Badan Keuangan Daerah

Judul penelitian : Analisis anggaran pendapatan dan belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato (Studi Kasus pada Badan Keuangan Kabupaten Pohuwato).

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 19 Maret 2022

Ketua


DR. Rahmawati, ST, SE, MM
NIDN : 0929417202



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jln. MH Tamrin No. 1 Blok Plan Perkantoran Tlp. (0443) 210484 Fax. (0443) 210856

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 900/BKD/249/IV/2022**

Yang ber tanda tangan di bawah, sekertaris badan keuangan daerah kabupaten pohuwatomenerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : CINDRI MANGELA
Nim : E1119131
Fakultas : Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo
Jurusan : Akuntansi
TTL : Marisa, 12 September 1999
Alamat : Dusun Tibawa Desa Padengo Kec, Duhiadaa kab, Pohuwato

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO).
Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Marisa, 2 April 2022

Mengetahui

An. Kepala BKD Kab, Pohuwato

Sekertaris


SUWARTONO HULAWA, SE
NIP. 19750302 200003 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax (0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unissu.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 085/SRP/FE-UNISAN/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Cindri Mangela
NIM : E1119131
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato (Studi
Kasus Pada Kantor Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pohuwato)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 24%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan

Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 06 Juni 2022
Tim Verifikasi,

Muh. Sabir M. SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

Skripsi Cindri Mangela (2).docx

AUTHOR

CINDRI MANGELA

WORD COUNT

7728 Words

CHARACTER COUNT

53189 Characters

PAGE COUNT

60 Pages

FILE SIZE

115.6KB

SUBMISSION DATE

May 28, 2022 3:48 PM GMT+8

REPORT DATE

May 28, 2022 3:50 PM GMT+8**● 24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)



Similarity Report ID: oid:25211:17782075

● 24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	adoc.pub Internet	3%
2	es.scribd.com Internet	3%
3	docplayer.info Internet	2%
4	jurnal.pancabudi.ac.id Internet	2%
5	coursehero.com Internet	1%
6	adoc.tips Internet	1%
7	repository.uma.ac.id Internet	<1%
8	repository.widyatama.ac.id Internet	<1%

[Sources overview](#)

9	repository.trisakti.ac.id	<1%
	Internet	
10	repository.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
11	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
12	scribd.com	<1%
	Internet	
13	economicsbosowa.unibos.id	<1%
	Internet	
14	mfadlyassagaf.blogspot.com	<1%
	Internet	
15	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
	Internet	
16	media.neliti.com	<1%
	Internet	
17	id.123dok.com	<1%
	Internet	
18	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
19	Natalia Manopo, Jenny Morasa, Lidia M. Mawikere. "ANALISIS BELANJ...	<1%
	Crossref	
20	eprint.stieww.ac.id	<1%
	Internet	

21	ejournal.unhi.ac.id Internet	<1%
22	123dok.com Internet	<1%
23	digilib.uinsgd.ac.id Internet	<1%
24	mkduncen.ac.id Internet	<1%
25	pustaka.ut.ac.id Internet	<1%

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama : CINDRI MANGELA
NIM : E1119131
Tempat/Tgl Lahir : Marisa, 12 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Angkatan : 2019
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Agama : Islam
Alamat : Desa Padengo, Kec. Duhiadaa
Kab. Pohuwato

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 01 Inpres Duhiadaa pada tahun 2012
2. Kemudian Melanjutkan Ke Jenjang Selanjutnya Yakni di SMP Negeri 3 Duhiadaa dan Lulus Pada tahun 2015
3. Kemudian Melanjutkan Ke Benjang Berikutnya yakni di SMK Negeri 1 Pinrang dan Lulus pada Tahun 2018
4. Dan Kemudian Melanjutkan ke Jenjang Berikutnya Yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan Pohuwato (STIE Ichsan Pohuwato) dengan Jurusan Akuntansi Kemudian Pada tahun 2019 di konversi ke Universitas Ichsan Gorontalo dan Alhamdulillah pada tahun 2022 telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Ichsaan Gorontalo